



PEMERINTAH
KABUPATEN
SLEMAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SLEMAN

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman selama satu tahun anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja BKAD selama periode pelaporan, yang meliputi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pada aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. Selain itu, laporan ini juga memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta permasalahan dan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman sepanjang tahun anggaran berjalan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sleman, 23 Januari 2026

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710710 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH	1
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	20
C. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	33
A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA BIDANG URUSAN KEUANGAN.....	33
1. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	33
a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	33
b. Rasio PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	38
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	40
a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	41
b. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).....	45
c. Predikat AKIP	46
d. Opini BPK Terhadap LKPD	47
3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	48
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	64
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	80
d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	85
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN	98
A. DANA KEISTIMEWAAN	98
1. Urusan Kelembagaan.....	98
BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2025	102
BAB V PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	17
Tabel 1. 2 Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025.....	18
Tabel 1. 3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	19
Tabel 1. 4 Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening)	23
Tabel 1. 5 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening).....	29
Tabel 1. 6 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Pengelolaan Dana dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening).....	30
Tabel 1. 7 Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025.....	30
Tabel 1. 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening).....	31
Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2025	33
Tabel 2. 2 Capaian Rasio PAD Terhadap APBD Tahun 2021-2025	38
Tabel 2. 3 Kondisi Penyertaan Modal kepada BUMD sampai dengan Tahun 2025	40
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 s.d 2025	40
Tabel 2. 5 Skor Nilai Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun 2021-2025	42
Tabel 2. 6 Penyerapan Anggaran Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun 2021-2025	43
Tabel 2. 7 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025	44

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Program pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2021-Tahun 2025	48
Tabel 2. 9 Data Perkembangan Capaian Kinerja Pendapatan Tahun 2021- 2025	86
Tabel 3. 1 Permasalahan dan Solusi Dana Keistimewaan.....	101
Tabel 4. 1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2025 Atas Catatan Rekomenndasi LKPJ Tahun 2024.....	103
Tabel 5. 1 Realisasi Keuangan BKAD Tahun 2025.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.....	14
Gambar 1. 2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.....	15
Gambar 1. 3 Gambar 1.XX Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	16
Gambar 1. 4 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Jabatan	18
Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai BKAD Sleman Berdasarkan Jenis.....	19
Gambar 1. 7 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Gambar 2. 1 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2021-2025	34
Gambar 2. 2 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi Tahun 2021-2025.....	37
Gambar 2. 3 Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2021 s/d 2025	43
Gambar 2. 4 Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 s/d 2025. 44	
Gambar 2. 5 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025	45
Gambar 2. 6 Grafik Nilai AKIP BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025.....	47
Gambar 2. 7 Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64
Gambar 2. 8 Dokumentasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah	80
Gambar 2. 9 Dokumentasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	85
Gambar 2. 10 Dokumentasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks (Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025)	121
Lampiran 2	Data Inovasi Perangkat Daerah (sudah ter SK dan belum ter SK kan yang masih berjalan)	134
Lampiran 3	Data Prestasi Perangkat Daerah (minimal tingkat Provinsi tahun 2025)	136
Lampiran 4	Laporan Capaian Indikator Kinerja Kunci dan Dokumen Pendukung*	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan;
- d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) Pelaksanaan urusan umum;
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan urusan keuangan;
- f) Pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- h) Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- i) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- j) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi, dan
- k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

- d) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f) Pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi dan pengaduan;
- g) Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c) Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah; dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah;
- d) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- e) Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah;
- f) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- g) Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah;
- h) Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- j) Pelaksanaan administrasi benda berharga;
- k) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah; dan
- l) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah;

- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah;
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah;
- g) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
- i) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

e. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c) Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
- d) Pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah;
- e) Pelaksanaan penatausahaan kas daerah;
- f) Pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

f. Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran;
- b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah;
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah;
- d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
- f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah;
- g) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah;
- i) Penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas;
- j) Penyusunan informasi penganggaran daerah;
- k) Penyusunan peraturan penganggaran daerah;
- l) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah; dan
- m) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah;
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- h) Pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

h. Bidang Aset

a) Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset dan penatausahaan dan pengendalian aset.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset;
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f) Pengurusan status hukum barang daerah;

- g) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- h) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
- i) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- j) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- k) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- l) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
- m) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- n) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah; dan
- o) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan keuangan dan Aset Daerah, dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

(1) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
- c) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
- d) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- g) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- h) pelaksanaan ketatausahaan;
- i) evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPTD

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

(2) UPTD Stadion Maguwoharjo

UPTD Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
- c) Pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- d) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga

- Pangkalan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- e) pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangkuan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - f) pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangkuan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - g) pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangkuan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - h) pemasaran dan kerja sama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangkuan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - i) pelaksanaan ketatausahaan;
 - j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPTD

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

3. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwohario sesuai dengan ketrampilan/keahlian.

c. **Kelompok Jabatan Fungsional** melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.

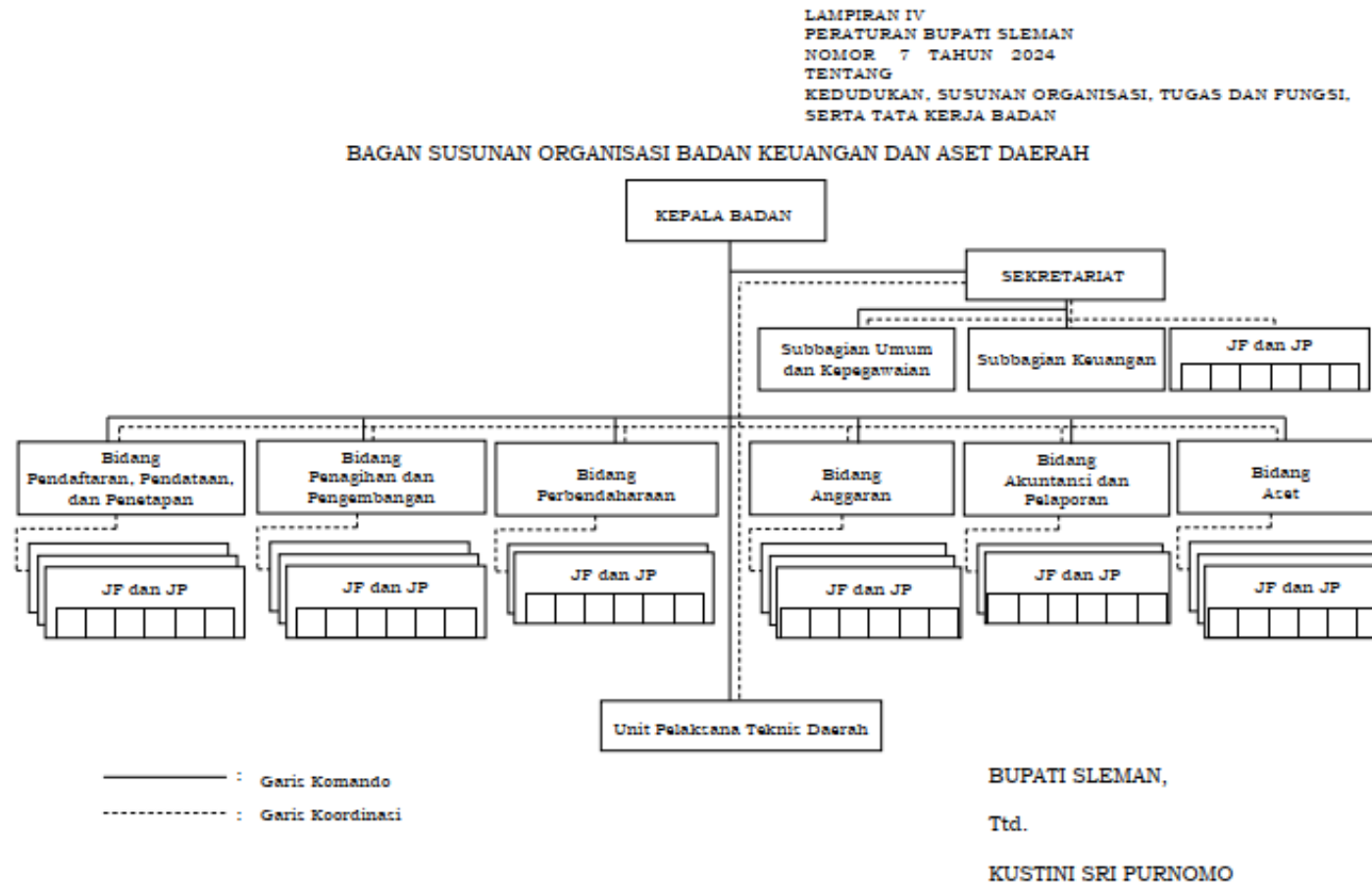
j. Tim Kerja

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.20/Kep.KDH/A/2024 tentang Rumpun Tugas Tim Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, telah ditetapkan Tim Kerja di lingkungan Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sleman melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 38/KPTS/2024 tentang Tim Kerja Di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari:

- 1) Tim Kerja Umum dan Kepegawaian;

- 2) Tim Kerja Keuangan;
- 3) Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi;
- 4) Tim Kerja Pendaftaran;
- 5) Tim Kerja Pendataan;
- 6) Tim Kerja Penetapan;
- 7) Tim Kerja Penagihan;
- 8) Tim Kerja Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan;
- 9) Tim Kerja Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- 10) Tim Kerja Belanja;
- 11) Tim Kerja Pengelolaan Kas Daerah;
- 12) Tim Kerja Analisis Anggaran;
- 13) Tim Kerja Perencanaan Anggaran;
- 14) Tim Kerja Pengendalian Anggaran;
- 15) Tim Kerja Akuntansi dan Evaluasi;
- 16) Tim Kerja Pelaporan;
- 17) Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- 18) Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
- 19) Tim Kerja Penatausahaan dan Pengendalian Aset;
- 20) Tim Kerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- 21) Tim Kerja Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- 22) Tim Kerja UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- 23) Tim Kerja Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

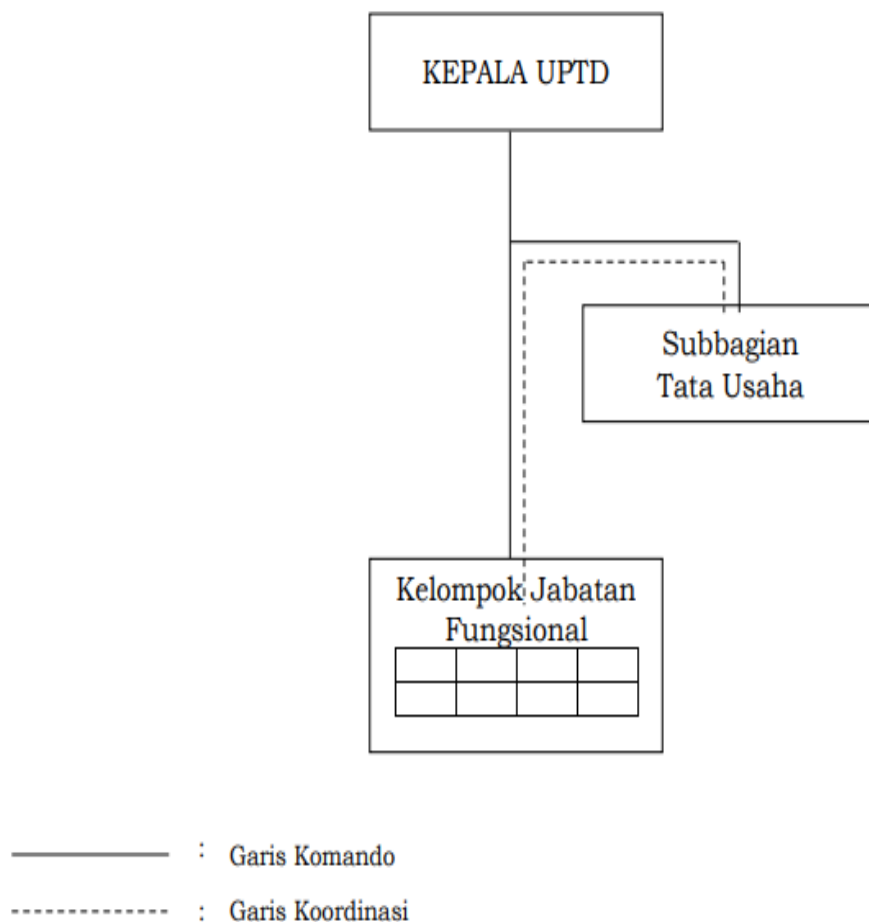
Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman



Gambar 1. 2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL**



BUPATI SLEMAN,

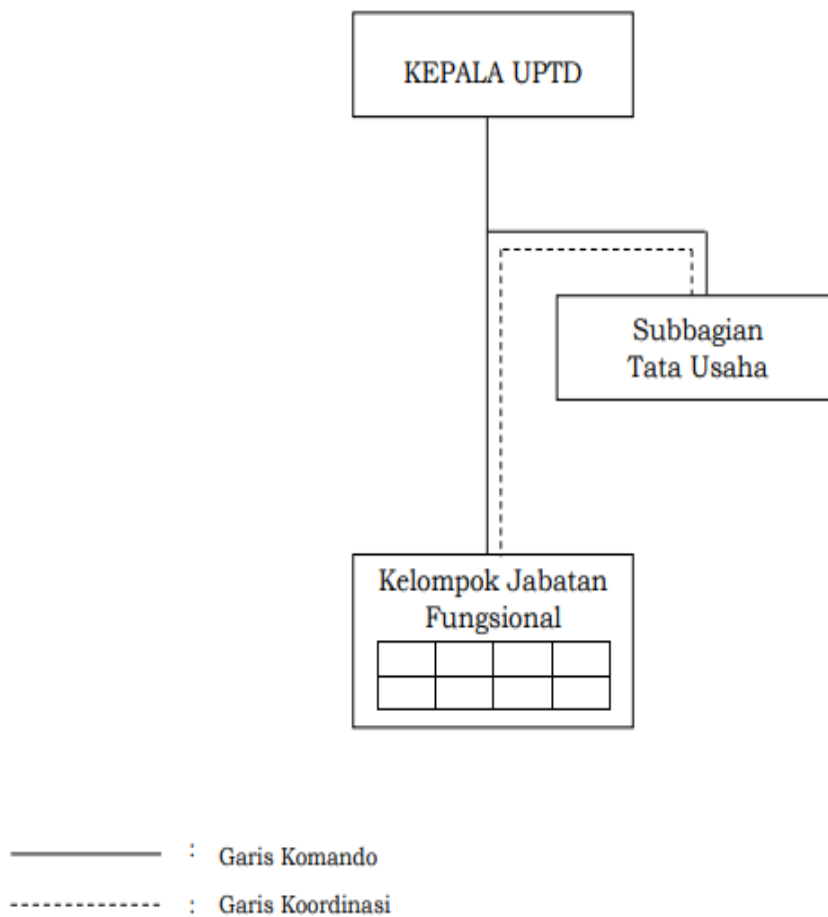
Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Gambar 1. 3 Gambar 1.XX Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO**



BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

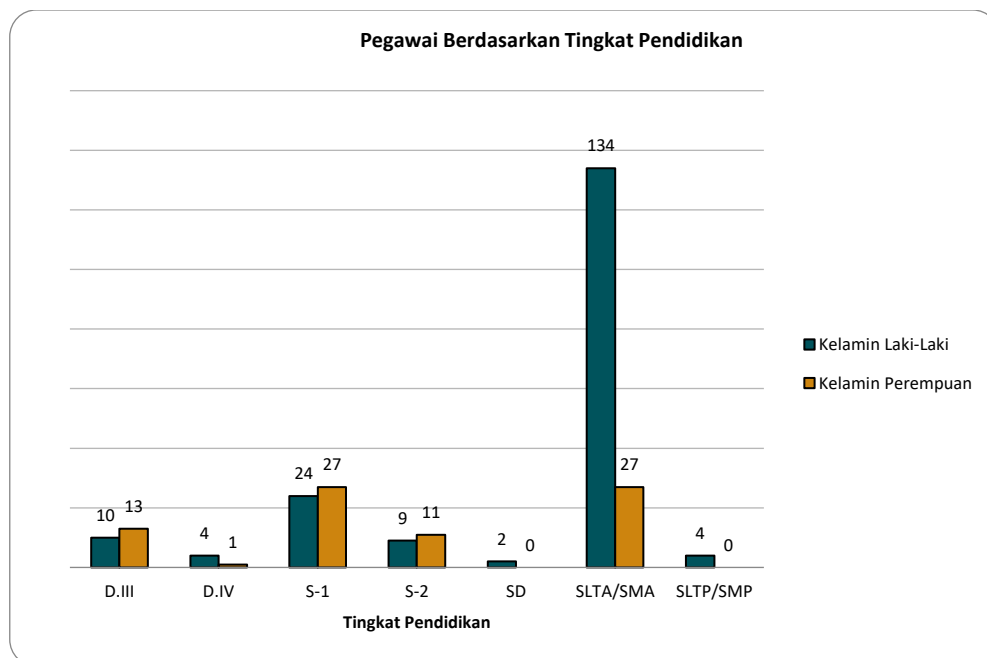
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman didukung oleh sumber daya manusia/pegawai yang berjumlah 196 orang dengan klasifikasi antara lain sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 1 Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S2	9	11
2	S1	24	27
3	D IV	4	1
4	D III	10	13
5	SMA	134	27
6	SMP	4	
7	SD	2	
	Jumlah	187	79

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 1. 4 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



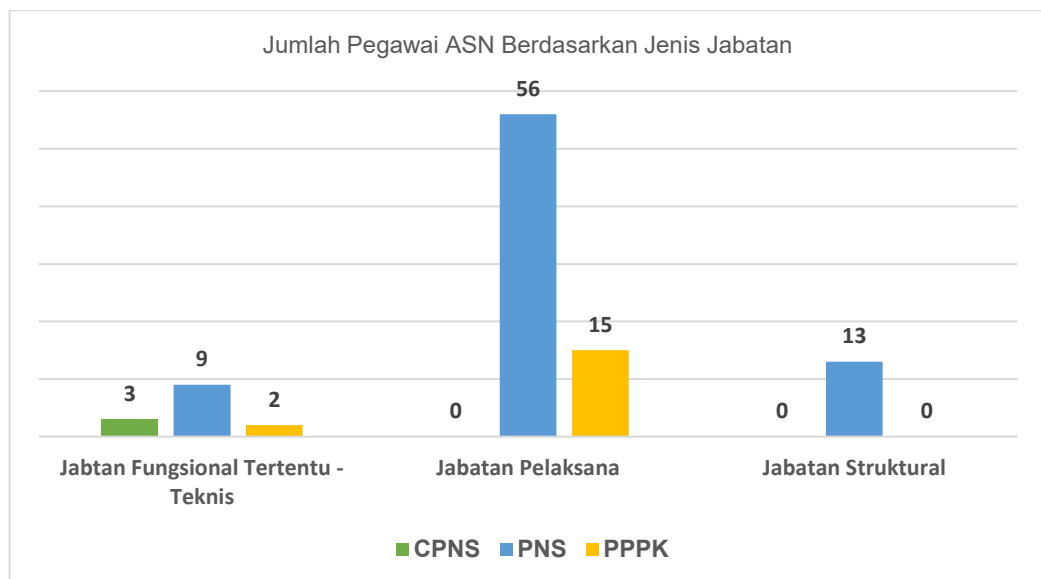
sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Tabel 1. 2 Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan				Total Pegawai Keseluruhan	
		Jenis Pegawai	Jabatan Fungsional Tertentu - Teknis	Jabatan Pelaksana	Jabatan Struktural		
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	CPNS	3	0	0	3	
		PNS	9	56	13	78	
		PPPK	2	15	0	17	
		PPPK Paruh Waktu					168
		Jumlah				196	

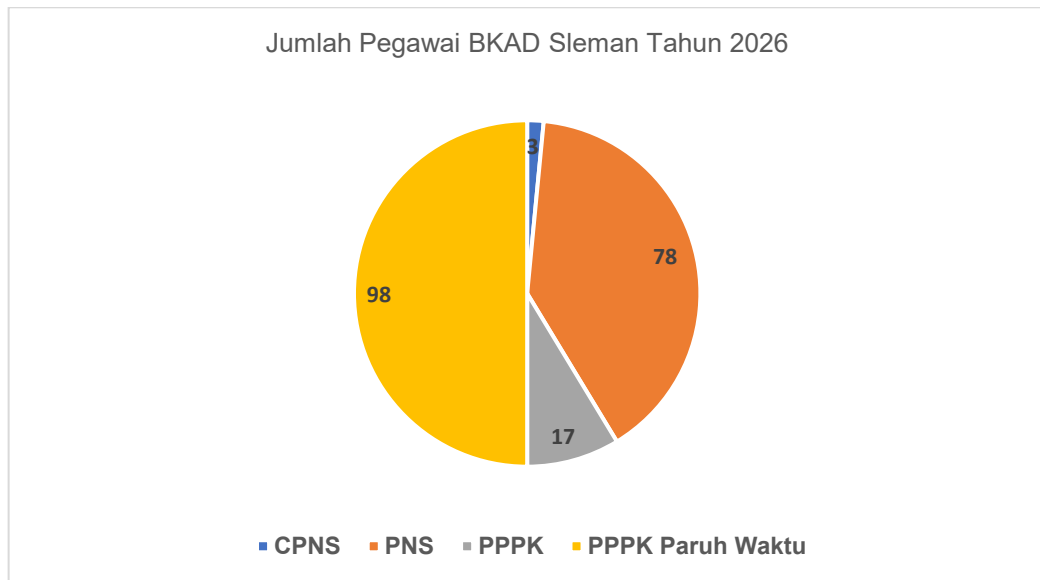
sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Jabatan



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai BKAD Sleman Berdasarkan Jenis



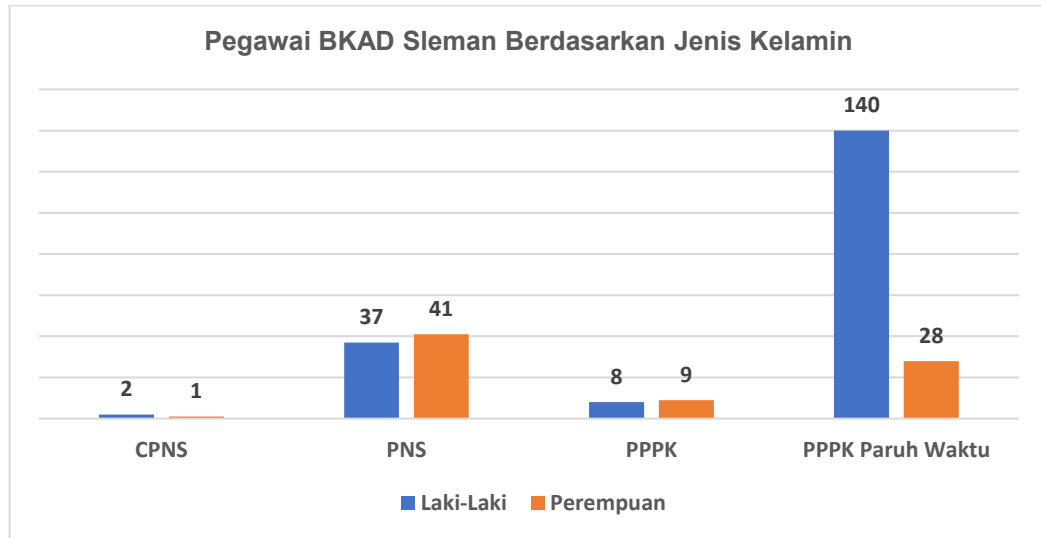
sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Tabel 1. 3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	CPNS	2	1
2	PNS	37	41
3	PPPK	8	9
4	PPPK Paruh Waktu	140	28
	Jumlah	140	28

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 1. 7 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan

pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa badan daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Unsur penunjang sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 diantaranya meliputi urusan keuangan. Selaku perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya adalah urusan keuangan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnya menurut asas otonomi dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum.

Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

C. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman didukung dana APBD Kabupaten Sleman tahun 2025 yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan keuangan adalah sebesar Rp602.571.019.003,00 dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp580.467.444.581,86 atau terealisasi sebesar 96,33%. Capaian tersebut di peroleh dari total anggaran yang dialokasikan untuk BKAD Kabupaten Sleman sebesar Rp596.273.853.072 terealisasi sebesar Rp574.045.013.069,86 atau 96,27%, total anggaran yang dialokasikan untuk UPTD Pengelolaan Dana dan Penanaman Modal sebesar Rp624.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp622.282.981,00 atau 99,72% dan total anggaran yang dialokasikan untuk UPTD Stadion Maguwoharjo sebesar Rp6.041.041.465,00 dan terealisasi sebesar Rp5.800.148.531,00 atau 96,01%. Sejumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan urusan keuangan yang dijabarkan dalam 2 (dua) urusan, 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan. BKAD Kabupaten Sleman juga sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai penghasil pendapatan daerah. Adapun target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp3.056.803.643.410,00 dengan realisasi sebesar Rp3.035.571.074.620,74 atau terealisasi 99,31%

Tabel 1. 4 Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening)

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	595.905.977.538,00	574.045.013.069,86	96,33%
	4.01.5.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	73.516.000,00	72.628.170,00	98,79%
	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	73.516.000,00	72.628.170,00	98,79%
	4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	73.516.000,00	72.628.170,00	98,79%
1	4.01.04.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	73.516.000,00	72.628.170,00	98,79%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	KEUANGAN	595.832.461.538,00	573.972.384.899,86	96,33%
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	52.228.889.342,00	46.953.408.845,86	89,90%
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.536.600,00	48.005.971,00	98,91%
2	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.176.475,00	35.911.981,00	99,27%
3	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500,00	1.678.710,00	95,25%
4	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.190.875,00	1.180.044,00	99,09%
5	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.191.375,00	1.107.515,00	92,96%
6	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.924.750,00	1.904.265,00	98,94%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
7	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.290.625,00	6.223.456,00	98,93%
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.688.077.134,00	32.243.487.797,00	90,35%
8	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.028.994.059,00	31.662.105.973,00	90,39%
9	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	585.040.000,00	515.795.000,00	88,16%
10	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	74.043.075,00	65.586.824,00	88,58%
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740.797.000,00	656.686.151,00	88,65%
11	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	740.797.000,00	656.686.151,00	88,65%
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.845.474.348,00	1.614.642.961,00	87,49%
12	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.794.700,00	92.353.278,00	85,68%
13	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.552.334,00	332.898.873,00	89,60%
14	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	543.829.600,00	522.005.608,00	95,99%
15	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.011.500,00	196.106.109,00	88,73%
16	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.130.000,00	67.219.236,00	90,68%
17	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527.156.214,00	404.059.857,00	76,65%
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.520.845.650,00	10.237.609.146,00	88,86%
18	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.383.405.000,00	9.209.518.000,00	88,69%
19	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.137.440.650,00	1.028.091.146,00	90,39%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962.660.800,00	884.957.851,00	91,93%
20	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000,00	41.412.210,00	86,28%
21	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.440.000,00	324.100.868,00	86,10%
22	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.220.800,00	519.444.773,00	96,51%
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.422.497.810,00	1.268.018.968,86	89,14%
23	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.107.100,00	343.044.635,00	79,76%
24	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	264.280.000,00	232.510.817,00	87,98%
25	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	728.110.710,00	692.463.516,86	95,10%
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	524.082.239.369,00	508.317.564.778,00	96,99%
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.778.665.675,00	1.587.600.858,00	89,26%
26	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	70.708.875,00	69.451.462,00	98,22%
27	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	42.760.000,00	42.144.844,00	98,56%
28	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	6.843.750,00	6.079.673,00	88,84%
29	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	6.843.750,00	6.406.703,00	93,61%
30	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	12.403.125,00	7.148.500,00	57,63%
31	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	13.903.125,00	13.336.427,00	95,92%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
32	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.065.234.600,00	997.104.580,00	93,60%
33	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	82.552.500,00	82.291.577,00	99,68%
34	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	477.415.950,00	363.637.092,00	76,17%
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	709.247.775,00	686.266.585,00	96,76%
35	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	125.190.475,00	117.533.319,00	93,88%
36	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	153.967.875,00	148.684.758,00	96,57%
37	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	95.036.100,00	90.757.284,00	95,50%
38	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	246.186.150,00	244.972.227,00	99,51%
39	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	21.129.675,00	19.751.999,00	93,48%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
40	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	67.737.500,00	64.566.998,00	95,32%
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	727.689.425,00	717.280.524,00	98,57%
41	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.599.975,00	41.174.350,00	98,98%
42	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	446.459.500,00	443.549.076,00	99,35%
43	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	228.998.250,00	222.956.497,00	97,36%
44	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.631.700,00	9.600.601,00	90,30%
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	520.866.636.494,00	505.326.416.811,00	97,02%
45	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	35.851.350,00	34.292.162,00	95,65%
46	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	386.062.182.185,00	385.847.584.215,00	99,94%
47	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.060.407.294,00	14.934.412.908,00	87,54%
48	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	117.708.195.665,00	104.510.127.526,00	88,79%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.073.577.575,00	1.968.790.047,00	94,95%
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.073.577.575,00	1.968.790.047,00	94,95%
49	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	385.364.700,00	376.486.652,00	97,70%
50	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.903.800,00	228.267.030,00	99,29
51	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	955.884.875,00	897.285.264,00	93,87%
52	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	439.574.200,00	405.106.150,00	
53	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	62.850.000,00	61.644.951,00	98,08
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.447.755.252,00	16.732.621.229,00	95,90%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.447.755.252,00	16.732.621.229,00	95,90%
54	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	112.885.125,00	112.695.384,00	99,83%
55	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	106.567.625,00	104.195.331,00	97,77%
56	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	431.660.075,00	391.210.935,00	90,63%
57	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	143.854.875,00	123.709.987,00	86,00%
58	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	490.535.000,00	401.390.279,00	81,83%
59	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.033.618.625,00	919.138.245,00	88,92%

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
60	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	245.260.925,00	200.193.823,00	81,62%
61	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	11.367.756.000,00	11.351.794.916,00	99,86%
62	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	143.863.700,00	142.825.281,00	99,28%
63	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.242.604.702,00	2.856.947.548,00	88,11%
64	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	129.148.600,00	128.519.500,00	99,51%

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

**Tabel 1. 5 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Stadion Maguwoharjo
Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening)**

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.041.041.465,00	5.800.148.531,00	96,01%
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.041.041.465,00	5.800.148.531,00	96,01%
1	5.02.03.2.01.0009	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.041.041.465,00	5.800.148.531,00	96,01%
Total			6.041.041.465,00		

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Tabel 1. 6 Laporan Realisasi Anggaran UPTD Pengelolaan Dana dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening)

No	Kode Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% realisasi keuangan
1	2	3	4	5	6
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	624.000.000,00	622.282.981,00	99,72%
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	624.000.000,00	622.282.981,00	99,72%
1	5.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	624.000.000,00	622.282.981,00	99,72%
Total			624.000.000,00		

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Tabel 1. 7 Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025

No	Jenis	Target	Realisasi	%
	PENDAPATAN DAERAH	Rp3.056.803.643.410,00	Rp 3.035.571.074.620,74	99,31
	I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 1.211.680.601.205,00	Rp 1.176.779.056.542,90	97,12
A	Pajak Daerah	Rp 1,122,082,412,000.00	Rp 1,112,322,393,221.75	99.13
B	Retribusi Daerah	Rp 2,250,000,000.00	Rp 4,101,436,856.00	182.29
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 44,919,417,985.00	Rp 44,649,622,604.06	99.40
D	Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 42,428,771,220.00	Rp 15,705,603,861.09	37.02
	II. PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1,845,123,042,205.00	Rp1,852,055,313,018.84	100.38
	III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 0,00	Rp 6.736.705.059,00	0,00

sumber: LRA. BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi nya sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana dalam tabel realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 1. 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (Per Rekening)

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah	1.475.549.978.604,00	1.484.607.544.203,74	-9.057.565.599,74	100,61
4101	Pajak Daerah	1.122.082.412.000,00	1.112.322.393.221,75	9.760.018.778,25	99,13
4102	Retribusi Daerah	203.579.953.000,00	234.969.925.115,00	-31.389.972.115,00	115,42
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.919.417.985,00	44.649.622.604,06	269.795.380,94	99,40
4104	Lain-lain PAD yang Sah	104.968.195.619,00	92.665.603.262,93	12.302.592.356,07	88,28
42	Pendapatan Transfer	1.845.123.042.205,00	1.852.055.313.018,84	-6.932.270.813,84	100,38
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.664.316.776.232,00	1.656.066.398.653,00	8.250.377.579,00	99,50
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.806.265.973,00	195.988.914.365,84	-15.182.648.392,84	108,40
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.736.705.059,00	-6.736.705.059,00	0
4301	Pendapatan Hibah	0	0	0,00	0
4302	Dana Darurat	0	0	0,00	0
4303	Pendapatan Lainnya	0	6.736.705.059,00	-6.736.705.059,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	3.320.673.020.809,00	3.343.399.562.281,58	-22.726.541.472,58	100,68
5	Belanja Daerah				
51	Belanja Operasi	2.557.337.382.623,00	2.376.992.009.291,48	180.345.373.331,52	92,95
5101	Belanja Pegawai	1.283.277.074.954,00	1.182.190.813.753,40	101.086.261.200,60	92,12
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.051.257.686.757,00	975.210.414.861,14	76.047.271.895,86	92,77
5103	Belanja Bunga	0	0	0,00	0
5104	Belanja Subsidi	0	0	0,00	0
5105	Belanja Hibah	187.254.940.912,00	184.775.048.309,94	2.479.892.602,06	98,68
5106	Belanja Bantuan Sosial	35.547.680.000,00	34.815.732.367,00	731.947.633,00	97,94
52	Belanja Modal	343.005.111.670,00	293.913.191.210,04	49.091.920.459,96	85,69
5201	Belanja Modal Tanah	376.400.000,00	372.900.000,00	3.500.000,00	99,07
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.426.556.637,00	101.447.861.990,52	9.978.694.646,48	91,04
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.076.024.852,00	88.389.376.507,19	35.686.648.344,81	71,24
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	93.741.613.251,00	91.239.894.009,33	2.501.719.241,67	97,33
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.854.480.130,00	9.470.912.687,00	383.567.443,00	96,11
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	3.530.036.800,00	2.992.246.016,00	537.790.784,00	84,77
53	Belanja Tidak Terduga	17.060.407.294,00	14.934.412.908,00	2.125.994.386,00	87,54
5301	Belanja Tidak Terduga	17.060.407.294,00	14.934.412.908,00	2.125.994.386,00	87,54
54	Belanja Transfer	503.911.167.150,00	490.498.501.041,00	13.412.666.109,00	97,34

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
5401	Belanja Bagi Hasil	117.848.984.965,00	104.650.916.826,00	13.198.068.139,00	88,80
5402	Belanja Bantuan Keuangan	386.062.182.185,00	385.847.584.215,00	214.597.970,00	99,94
	Jumlah Belanja	3.421.314.068.737,00	3.176.338.114.450,52	66.420.399.903,06	92,84
	Surplus/(Defisit)	-100.641.047.928,00	167.061.447.831,06	66.420.399.903,06	166,00
6	Pembiayaan Daerah				
61	Penerimaan Pembiayaan	153.419.047.928,00	153.419.047.928,02	-0,02	100,00
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	153.419.047.928,00	153.419.047.928,02	-0,02	100,00
	Jumlah Penerimaan	153.419.047.928,00	153.419.047.928,02	0,00	100,00
62	Pengeluaran Pembiayaan	52.778.000.000,00	52.778.000.000,00	0,00	100,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00	100,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	52.778.000.000,00	52.778.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran	52.778.000.000,00	52.778.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	100.641.047.928,00	100.641.047.928,02	-0,02	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	267.702.495.759,08	66.420.399.903,04	100,00

sumber : : LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited) ; BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA BIDANG URUSAN KEUANGAN

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan secara lebih detail diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan,

1. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Capaian IKD pada fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks	B (78)	B (78, 61)	100,78
2	Rasio PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	%	36,37	46,74	128,51

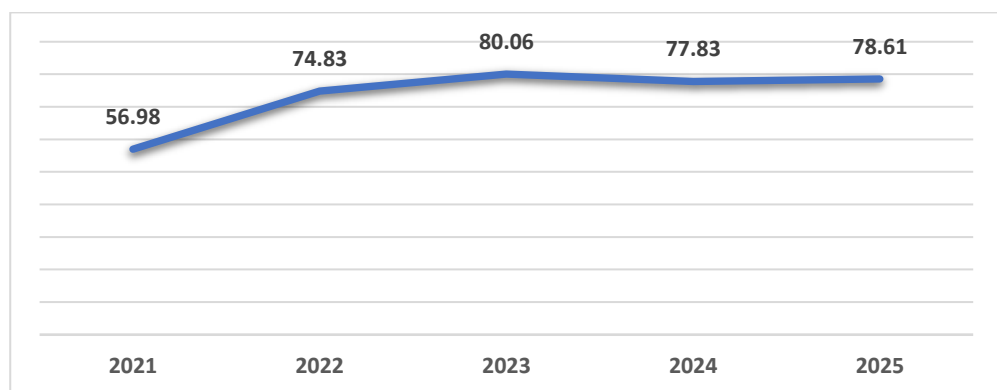
Sumber : RPJMD Kab. Sleman Tahun 2025-2029
BKAD Sleman, Tahun 2025

a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Disamping itu pengukuran IPKD bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD pemerintah kabupaten dilakukan oleh pemerintah provinsi. Capaian indikator IPKD adalah pengukuran atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2025 atas pengelolaan keuangan tahun 2024.

Gambar 2. 1
Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2021-2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Capaian IPKD Kabupaten Sleman berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan trend nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2021 memperoleh nilai skor 56,98 yang kemudian terus mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan memperoleh nilai skor 80,06 dengan predikat A. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami penurunan dan kembali lagi di Predikat B. Pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 78,61 dengan Predikat B.

Pada tahun 2025 penilaian IPKD dilakukan terhadap 6 (enam) dimensi. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a) **Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**
Pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran . Pengukuran dilakukan pada kesesuaian nomenklatur Program RPJMD dan RKPD, selanjutnya kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dan program KUA-PPAS dan APBD. Kemudian kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dilanjutkan dengan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD
- b) **Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**
Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar minimal 20%, alokasi belanja Pegawai Maksimal 30%, alokasi Belanja Infrastruktur Minimal 40%, serta Indikator Alokasi Belanja SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- c) **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**
Pada dimensi ini pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Miliki Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 16 (Enam Belas) jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran), Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran), Peraturan APBD tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP), Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran), Opini BPK, Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d) Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

e) Kondisi Keuangan Daerah

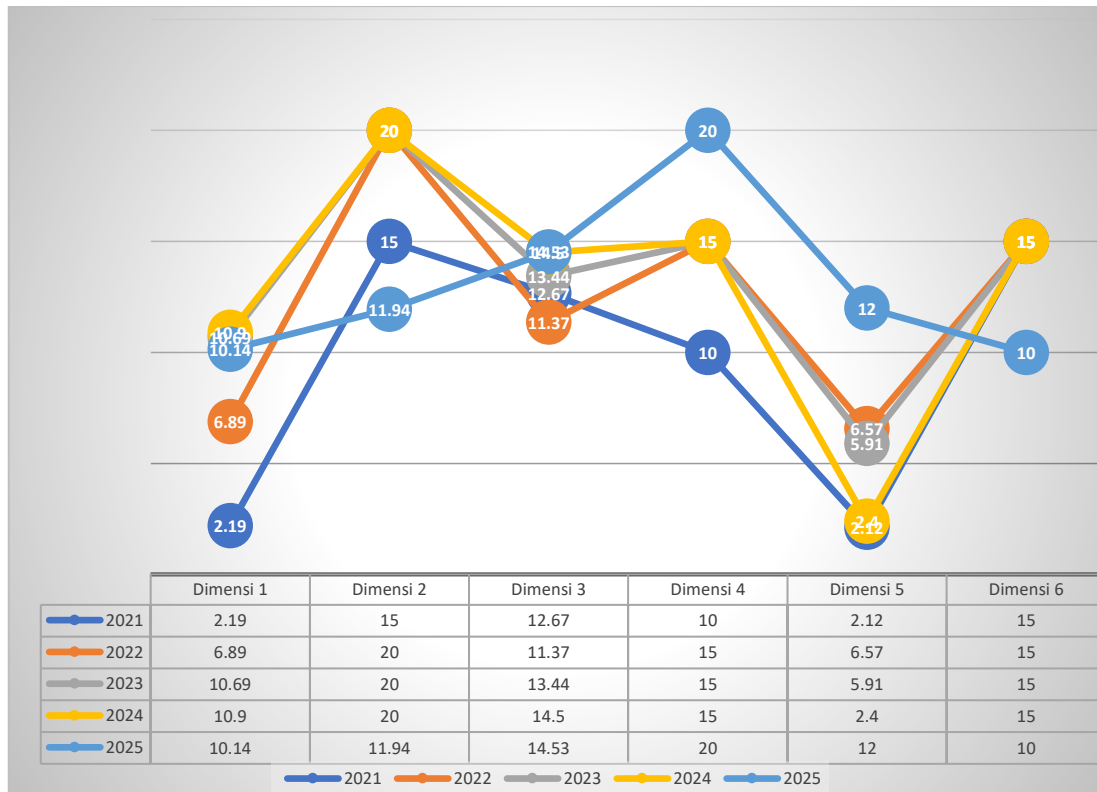
Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 5 (Lima) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Kemandirian Keuangan;
2. *Solvabilitas* Operasional;
3. *Solvabilitas* Jangka Panjang;
4. *Fleksibilitas* Keuangan; dan
5. *Solvabilitas* Jangka Pendek.

f) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Pada dimensi ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 4 (Empat) tahun berturut-turut.

Gambar 2. 2 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi Tahun 2021-2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Sesuai Gambar 2.2 hasil pengukuran IPKD tahun 2025 menunjukkan adanya kenaikan pada Dimensi 3 (tiga) Dimensi 4 (empat), Dimensi 5 (lima) dan Dimensi 6 (enam) sedangkan pada Dimensi 1 (satu) dan Dimensi 2 (dua) mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada :

a. Dimensi 1 (satu)

Pada Dimensi 1.1 (kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2024) Laporan tahun 2024 sebanyak 292 program dimana 145 program berstatus sesuai dan 147 program berstatus tidak sesuai. Maka indeks total dari laporan yang di hasilkan adalah 0.5.

Dimensi 1.4 (Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS) Laporan tahun 2024 sebanyak 311 program dimana 155 program berstatus sesuai dan 156 program berstatus tidak sesuai. Maka indeks total dari laporan yang di hasilkan adalah 0.5.

Pada Dimensi 1.5 (Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD) Laporan tahun 2024 sebanyak 314 program dimana 121 program berstatus sesuai dan 193 program berstatus tidak sesuai. Maka indeks total dari laporan yang di hasilkan adalah 0.39.

b. Dimensi 2 (dua)

Pada Alokasi Belanja Infrastruktur yang dialokasikan minimal 40% sedangkan yang dialokasikan sebesar 20% sehingga tidak memenuhi kriteria dan memperoleh nilai 0 dari skor maksimal 1. Kemudian Indikator Alokasi Belanja SPM mendapatkan skor 0,38 dari skor maksimal 1 dan memiliki catatan Kurang melampirkan rencana kebutuhan pemenuhan anggaran dari dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra/RKPD) serta Kualitas/ sistematika laporan SPM per OPD tidak seragam dan rata-rata belum menampilkan kebutuhan pemenuhan anggaran yang diambil dari dokumen perencanaan (per jenis layanan)

b. Rasio PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (otonomi fiskal) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 2. 2 Capaian Rasio PAD Terhadap APBD Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Realisasi PAD	803,679,358,719.08	1,061,064,803,656.40	1,130,157,860,240.59	1,184,122,706,289.95	1,484,607,544,203.74
2.	Realisasi Belanja daerah	2,714,312,898,539.54	3,040,474,126,755.75	3,112,705,809,033.77	3,287,530,719,211.45	3,176,338,114,450.52
3.	Rasio	29.61	34.90	36.31	36.02	46.74

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2, capaian realisasi Rasio PAD terhadap APBD selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuatif. Selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 29,61 di tahun 2021 menjadi 36,31 di tahun 2023, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 36,02 di tahun 2024, dan kembali naik menjadi 46,74 di tahun 2025.

Pada tahun 2025, target Rasio PAD terhadap APBD yang ditetapkan sebesar 36,37 dengan realisasi mencapai 46,74. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 128,51% yang menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut mengindikasikan meningkatnya kontribusi PAD dalam belanja daerah, yang mencerminkan perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan ini antara lain didukung oleh optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah, serta penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang sah.

Bentuk strategi lain sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD adalah penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat permodalan BUMD agar dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik. BUMD menjadi salah satu sumber PAD selain pajak dan retribusi, melalui kontribusi dividen.

Penyertaan modal ke BUMD Kabupaten Sleman diberikan kepada lima lembaga yaitu: PT BP Bank Sleman (Peseoda), PDAM Tirta Sembada, PT Bank BPD DIY, BUKP, dan PT BP Syariah Sleman (Peseoda).

Adapun penyertaan modal yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kondisi Penyertaan Modal kepada BUMD sampai dengan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Penyertaan Modal Berdasarkan Perda (Rp)	Jumlah Penyertaan yang telah disetorkan s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Penyertaan yang telah disetorkan s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Jumlah Modal yang belum disetorkan s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Modal yang belum disetorkan s.d 31 Desember 2025 (Rp)
1	PT BPR Bank Sleman (Perseroda)	329.274.999.760,00	207.716.276.000,00	217.716.276.000,00	121.558.723.760,00	111.558.723.760,00
2	PDAM Tirta Sembada	287.931.797.537,00	177.061.510.537,00	191.219.823.537,00	110.870.287.000,00	96.711.974.000,00
3	PT Bank BPD DIY	592.800.000.000,00	402.513.000.000,00	435.942.000.000,00	190.287.000.000,00	156.858.000.000,00
4	BUKP	2.489.034.722,00	2.489.034.722,00	2.489.034.722,00	-	-
5	PT BPR Syariah Sleman (Perseroda)	16.125.000.000,00	16.125.000.000,00	16.125.000.000,00	-	-
	Jumlah	1.228.620.832.019,00	805.904.821.259,00	863.492.134.259,00	422.716.010.760,00	365.128.697.760,00

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Secara keseluruhan, capaian Rasio PAD terhadap APBD yang melebihi target menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan secara efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah serta penurunan ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Adapun pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman memiliki beberapa IKU yang tertuang dalam Renstra BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dan Renstra BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Renstra BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2021 s.d 2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun				Tahun 2025		
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks	B(56,96)	B(74,84)	A(80,06)	B(77,83)	78	B(78,61)	100,79

No.	Indikator	Satuan	Tahun				Tahun 2025		
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	82,26	83,03	81,50	85,43	85,1	86,03	101,09
3	Predikat AKIP	Nilai	A (84)	BB (76,95)	A (84)	A (83,80)	A (84)	A (**83,80)	100
4	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP	100

**Data sementara

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD selain sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dalam sub Indikator Kinerja Kunci Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, indikator tersebut juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra BKAD Sleman Tahun 2021-2026 dan Renstra BKAD Tahun 2025-2029.

Pada penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 merupakan penilaian tahun n-1 yang dinilai pada tahun n. Dari hasil penilaian di tahun 2025 IPKD memperoleh hasil 78,61 dimana target pada tahun n-1 sebesar 78 (B) sehingga capaian kinerja pada IPKD sebesar 100,78% atau diatas dari target yang ditentukan.

Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan untuk mengukur IPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

Dalam dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang diukur dari kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran, mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD, dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS, dan dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD, memperoleh nilai 10,14 dari nilai maksimal 15, sehingga diperlukan upaya perbaikan pengelolaan kesesuaian

dokumen perencanaan dan penganggaran baik dari aspek jumlah program dan pagu anggarannya.

Pada dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% terealisasi 29,5%, untuk belanja pegawai sebesar maksimal 30% terealisasi 29%, alokasi belanja infrastruktur minimal 40% terealisasi 20%, serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperoleh skor 0,38 dari skor maksimal yang ditentukan yaitu 1.

Tabel 2. 5 Skor Nilai Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Skor pada Dimensi 2	15	20	20	20	11,94

Keterangan: skor total maksimal pada dimensi 2 adalah 20.

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Pengalokasian anggaran belanja sesuai indikator dalam dimensi penilaian IPKD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 memperoleh skor nilai maksimal 20 dan mengalami peningkatan 5 poin apabila dibandingkan tahun 2021. Nilai maksimal yang sama diraih selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2024, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 11,94 poin di tahun 2025. Penurunan di tahun 2025 terjadi karena untuk pengalokasian anggaran infrastruktur pada tahun 2024 hanya terealisasi dialokasikan sebesar 20% dari total anggaran belanja yang harusnya sesuai ketentuan adalah sebesar 40%.

Pada dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan, pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesan dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Miliik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas pemerintah daerah dan opini BPK. Dalam dimensi ini memperoleh skor nilai 14,5 dari nilai skor maksimal 15.

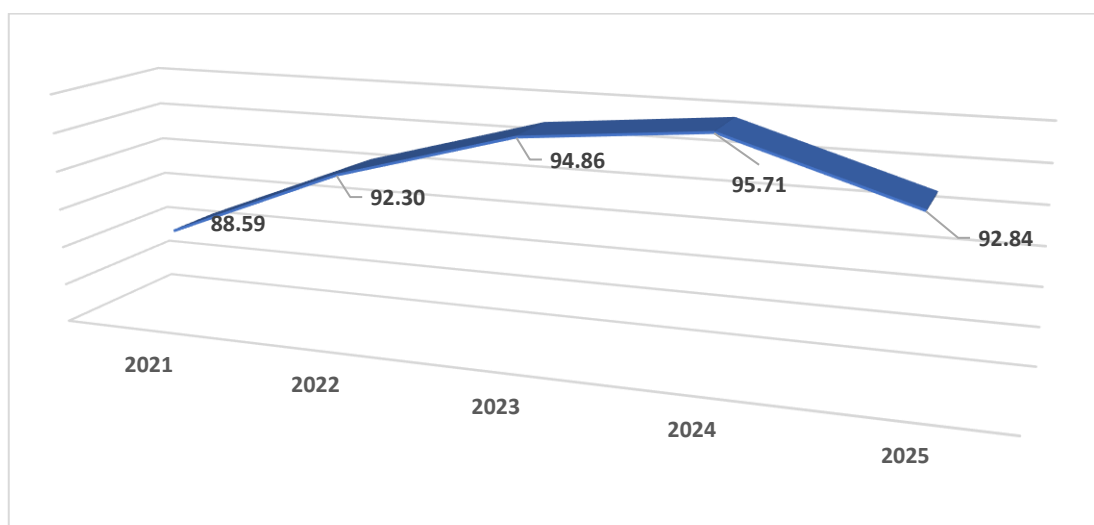
Dimensi Penyerapan Anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer memperoleh nilai skor 20 dari skor maksimal 20.

Tabel 2. 6 Penyerapan Anggaran Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun 2021-2025

Anggaran	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rencana	3,063,792,544,726.01	3,294,274,837,020.55	3,281,307,765,874.00	3,434,915,639,694.00	3,421,314,068,737.00
Realisasi	2,714,312,898,539.54	3,040,474,126,755.75	3,112,705,809,033.77	3,287,530,719,211.45	3,176,338,114,450.52

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 2. 3 Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2021 s/d 2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

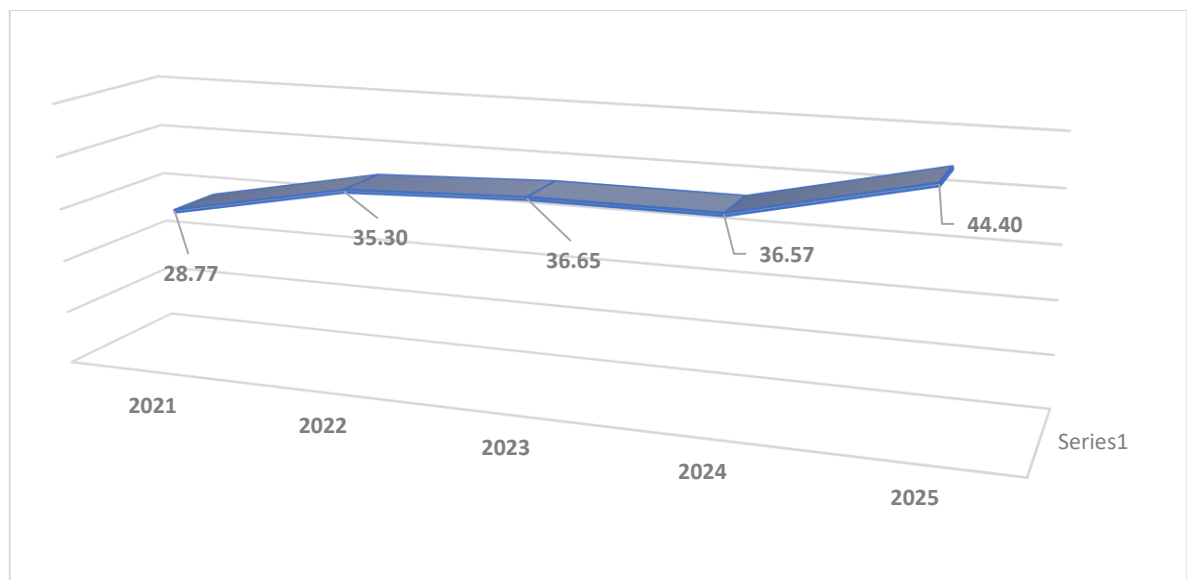
Pada dimensi Kondisi Keuangan Daerah yang mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif memperoleh nilai skor 12 dari nilai skor maksimal 20. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah yaitu: kemandirian keuangan; solvabilitas operasional; solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas jangka pendek.

Tabel 2. 7 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025

No	Anggaran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Realisasi PAD	803,679,358,719.08	1,061,064,803,656.40	1,130,157,860,240.59	1,184,122,706,289.95	1,484,607,544,203.74
2	Realisasi Pendapatan	2,793,328,384,634.58	3,005,980,155,062.84	3,083,612,992,324.47	3,238,107,257,277.72	3,343,399,562,281.58
3	Persentase	28.77	35.30	36.65	36.57	44.40

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Gambar 2. 4 Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 s/d 2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

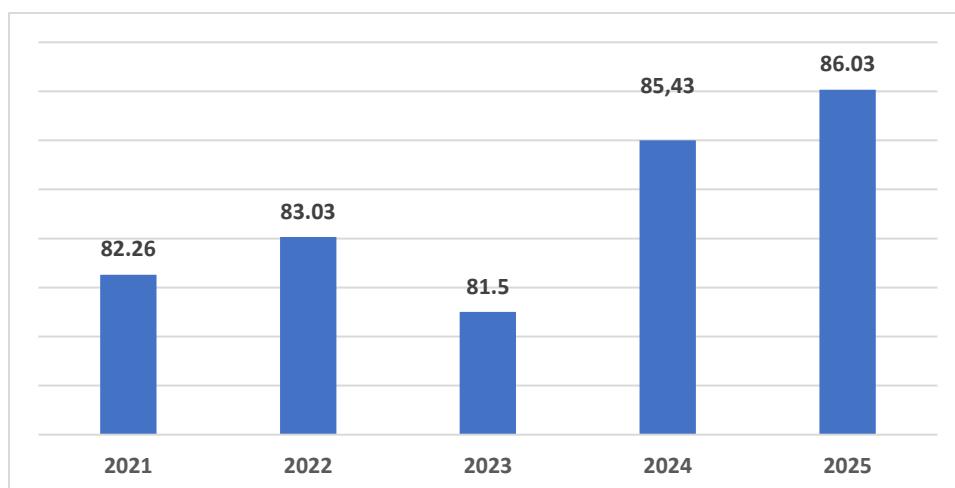
Pada dimensi ini Opini BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang

menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh 14 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Gambar 2. 5 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

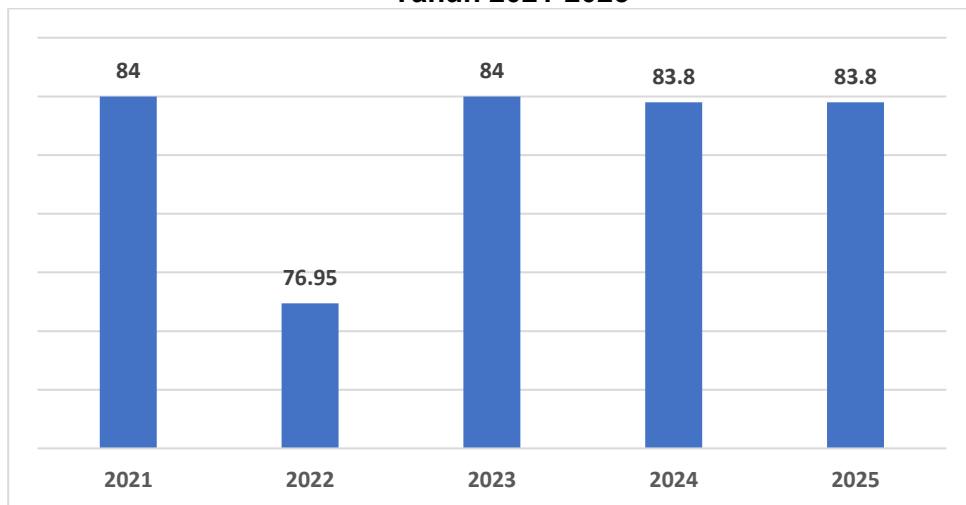
Capaian IKM BKAD Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2023 capaian IKM sebesar 81,5 mengalami penurunan sebesar 1,53 point jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 83,03. Capaian tersebut kemudian kembali naik menjadi 85,43 di tahun 2024 dan bertambah 0,6 point menjadi 86,03 di tahun 2025.

IKM pada BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2025 untuk periode penilaian semester 1 memperoleh nilai sebesar 86,01 sedangkan untuk periode semester II Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh nilai sebesar 86,05. Sedangkan untuk Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat pada BKAD Kabupaten Sleman memiliki target target pada tahun 2025 sebesar 85,1 dan memperoleh nilai sebesar 86,03 sehingga memperoleh capaian sebesar 101,09% atau diatas dari target yang ditentukan.

c. Predikat AKIP

Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Dalam melakukan evaluasi atas LKjIP perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman mendasarkan pada aturan dari Kementerian PAN RB atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Atas penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.

Gambar 2. 6 Grafik Nilai AKIP BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Predikat AKIP pada BKAD Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima tahun) mengalami fluktuatif namun demikian di tahun 2024 nilai mengalami kenaikan sebesar 0,20 point menjadi 84 dengan predikat B dari nilai di tahun 2023 sebesar 83,80 dengan predikat A. Kenaikan nilai AKIP menunjukkan upaya BKAD Kabupaten Sleman dalam upaya perbaikan akuntabilitas kinerja.

Pada predikat AKIP BKAD Kabupaten Sleman untuk tahun 2025 memiliki target sebesar A (84). Capaian realisasi nilai AKIP yang digunakan masih data tahun 2024 dikarenakan penilaian AKIP untuk tahun 2025 dilakukan di semester pertama tahun 2026.

d. Opini BPK Terhadap LKPD

Indikator kinerja opini BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menjadi definisi operasional pengukuran adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh 14 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk Penilaian WTP atas kinerja tahun 2025 menunggu audit BPK di semester pertama tahun 2026.

3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dilaksanakan di BKAD Kabupaten Sleman didukung oleh 4 (empat) program urusan pemerintahan daerah dengan 14 kegiatan dan 68 sub kegiatan, serta 1 program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang akan di bahas di BAB selanjutnya. Adapun capaian kinerja indikator program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Program pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2021-Tahun 2025

No.	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	-	-	-	-	100	100	100
	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	-	-	-	-	100	100	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu penyaluran bantuan keuangan penunjang urusan keuangan kewenangan	%	100	100	100	100	100	98,83	98,84

No.	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	pengelolaan keuangan daerah								
	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	Nilai	-	-	-	-	11	10,14	92,18
	Persentase kesesuaian pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan surat penyediaan dana (SPD) perangkat daerah	%	-	-	-	-	91,21	92,84	101,791
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	%	-	-	-	-	82	100	121,95
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	%	84	84	86	88	90	87,50	97,22
	Indeks pengelolaan barang milik daerah (IP BMD)/Indeks pengelolaan aset	Nilai	-	-	-	-	B (2,65)	B (2,88)	108,68
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%		26,19	22,28	25,58	25,75	22,22	86,29
	Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	Nilai Indeks		81,94	84,54	85	85,20	85,91	100,83
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	%	-	-	-	-	37,5	44,40	118,41
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	%	-	-	-	-	36,37	46,74	128,51
	Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	-	-	-	-	1,39	1,75	125,66
	Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah	%	-	-	-	-	2,25	30,63	1361,27

Keterangan: (-) tidak diisi karena merupakan indikator baru pada Renstra BKAD Kab Sleman Tahun 2025-2029

Sumber: BKAD. Kab Sleman, 2025, data terolah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman, didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan. Total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp52.228.889.342,00 dan terealisasi sebesar Rp46,953,408,845.86 atau sebesar 98,91%, serta terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang menjadi kewenangan dari UPTD Pengelolaan Dana dan Penanaman Modal dimana total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 624.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp622.282.981,00 atau sebesar 99,72%.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki 4 (empat) indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran telah terealisasi 100% dari target 100%. realisasi diperoleh dari jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100.

Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan telah terealisasi 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari jumlah layanan perencanaan dan keuangan yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi kali 100.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja telah terealisasi 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dibagi jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang seharusnya tersedia kali 100.

Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran telah terealisasi 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari jumlah layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi kali 100.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp48.536.600,00 dan terealisasi sebesar Rp48.005.971,00 atau sebesar 98,91%.
 - b. Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%
 - a) Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp36.176.475,00 dan terealisasi sebesar Rp35.911.981,00 atau sebesar 99,27%.
 - b. Target sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Adalah 5 (lima) dokumen dan terealisasi sebanyak 5 (lima) dokumen yang terdiri dari Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan, atau capaian 100%.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp1.762.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.678.710,00 atau sebesar 95,25%.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari RKA Tahun 2026 dan Koordinasi penyusunan RKA, atau capaian 100%.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp1.190.875,00 dan terealisasi sebesar Rp1.180.044,00 atau sebesar 99,09%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari RKA perubahan tahun 2026 dan koordinasi penyusunan RKA, atau capaian 100%.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp1.191.375,00 dan terealisasi sebesar Rp1.107.515,00 atau sebesar 92,96%
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari DPA Perubahan Tahun 2025 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA Perubahan, atau capaian 100%.
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

- DPA- SKPD sebesar Rp1.924.750,00 dan terealisasi sebesar Rp1.904.26,00 atau sebesar 98,94%
- b. Target sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD adalah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari DPA Perubahan tahun 2025 dan Koordinasi penyusunan DPA Perubahan, atau capaian 100%.
- f) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp6.290.625,00 dan terealisasi sebesar Rp6.223.456,00 atau sebesar 98,93%
 - b. Target sub kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan adalah 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang terdiri dari Laporan Bulanan/RFK Teppa, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan / LKJiP, Laporan Dalev, Evaluasi IPKD, Evaluasi SPIP, atau capaian 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp35.688.077.134,00 dan terealisasi sebesar Rp32.243.487.797,00 atau sebesar 90,35%.
 - b. Target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%
- a) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp35.028.994.059,00 dan terealisasi sebesar Rp31.662.105.973,00 atau sebesar 90,39%.

- b. Target sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi seluruhnya atau capaian 100%.
- b) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp585.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp515.795.000,00 atau sebesar 88,16%.
 - b. Target sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen Penatausahaan dan Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, atau capaian 100%.
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp74.043.075,00 dan terealisasi sebesar Rp65.586.824,00 atau sebesar 88,58%.
 - b. Target sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD adalah 2 (dua) Laporan dan terealisasi sebanyak 2 (dua) Laporan yang terdiri dari Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, atau capaian 100%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp740.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp656.686.151,00 atau sebesar 88,65%.
 - b. Target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 100% dan terealisasi sebesar 100%.
 - a) Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp740.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp656.686.151,00 atau sebesar 88,65%.
 - b. Target sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen yang terdiri dari (Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian) atau capaian 100%.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp1.845.474.348,00 dan terealisasi sebesar Rp1.614.642.961,00 serta pada kegiatan ini memiliki atau sebesar 87,49%.
 - b. Target kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%.

- a) Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp107.794.700,00 dan terealisasi sebesar Rp92.353.278,00 atau sebesar 85,68%.
 - b. Target sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 (enam) paket dan terealisasi sebanyak 6 (enam) paket pemeliharaan jaringan listrik atau tercapai sebesar 100%.
- b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp371.552.334,00 dan terealisasi sebesar Rp332.898.873,00 atau sebesar 89,60%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 (Satu) Paket (Kursi Pejabat dan Kursi Rapat, HP, CCTV, TV LED, Komputer dan laptop, Printer, Dispenser, AC, rambu-rambu) dan terealisasi sebanyak 1 (Satu) Paket yang terdiri dari (Kursi Pejabat 3 buah dan Kursi Rapat 10 Buah, HP 1 Buah, CCTV, TV LED 2 Buah, Komputer 10 buah dan laptop 1 buah, Printer 3 buah, Dispenser 1 buah, AC 1 buah, Rambu-rambu 13 buah) atau tercapai sebesar 100%.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp543.829.600,00 dan terealisasi sebesar Rp522.005.608,00 atau sebesar 95,99%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 (Satu) Paket (ATK, Kertas dan Cover, Bahan computer, Peralatan Dinas (umbul-umbul), belanja natura, Makan minum rapat, Belanja publikasi) dan terealisasi sebanyak 1 (Satu) Paket yang terdiri dari ((ATK, Kertas dan Cover, Bahan computer, Peralatan Dinas (umbul-umbul), belanja natura, Makan minum rapat, Belanja publikasi) atau tercapai sebesar 100%.
- d) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp221.011.500,00 dan terealisasi sebesar Rp196.106.109,00 atau sebesar 88,73%.
 - b. Target sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Adalah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 (satu) paket (Kertas Hammer dan Bahan Cetakan) dan terealisasi sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari (kertas hammer dan Bahan cetakan) atau tercapai sebesar 100%.
- e) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp74.130.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.219.236,00 atau sebesar 90,68%.

- b. Target Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Adalah sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan yang terdiri dari laporan kunjungan tamu bulanan 12 Bulan atau tercapai sebesar 100%.
 - f) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp527.156.214,00 dan terealisasi sebesar Rp404.059.857,00 atau sebesar 76,65%.
 - b. Target sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 (satu) Laporan dan telah di realisasikan sebanyak 1 (satu) Laporan yang terdiri atas laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) atau tercapai sebesar 100%.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp11.520.845.650,00 dan terealisasi sebesar Rp10.237.609.146,00 atau sebesar 88,86%.
 - b. Target Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja 100% dan terealisasi sebesar 100%.
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar

Rp10.383.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.209.518.000,00 atau sebesar 88,69%.

- b. Target Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 25 unit dan terealisasi sebanyak 25 unit yang terdiri dari sepeda motor 6 unit, microbus 1 unit, Kendaraan bermotor khusus hiace 1 unit (opsen), Xpander 13 unit, CRV 2 unit, Pajero 1 unit dan Pickup 1 unit (opsen) atau tercapai sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp1.137.440.650,00 dan terealisasi sebesar Rp1.028.091.146,00 atau sebesar 90,39%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 3 (tiga) unit dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) unit atau tercapai sebesar 100%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp962.660.800,00 dan terealisasi sebesar Rp884.957.851,00 atau sebesar 91,93%.
 - b. Target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah 100% dan terealisasi sebesar 100%

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp48.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.412.210,00 atau sebesar 86,28%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan yang terdiri dari Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Pembelian Materai 3.300 buah, Fumigasi 1 paket, Belanja Pengiriman 120 kali, atau tercapai sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp376.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp324.100.868,00 atau sebesar 86,10%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan yang terdiri dari laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: tagihan telepon 12 bulan, tagihan air 12 bulan, tagihan listrik 12 bulan, langganan surat kabar 12 bulan, langganan Internet 3 aplikasi, atau tercapai sebesar 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor sebesar Rp538.220.800,00 dan terealisasi sebesar Rp519.444.773,00 atau sebesar 96,51%.

- b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan yang terdiri dari laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor: alat dan bahan pembersih 2 paket, obat - obatan 1 paket, pakaian kerja security dan cleaning 12 paket dan gaji security dan cleaning 10 orang/12 bulan, atau tercapai sebesar 100%.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp1.422.497.810,00 dan terealisasi sebesar Rp1.268.018.968,86 atau sebesar 89,14%.
- b. Target Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah persentase barang milik daerah terpelihara 100% dan terealisasi sebesar 100%.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp430.044.635,00 dan terealisasi sebesar Rp343.044.635,00 atau sebesar 79,76%.
- b. Target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 Unit dan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya terealisasi sebanyak 30 unit atau tercapai sebesar 100%.

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp264.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp232.510.817,00 atau sebesar 87,98%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 7 (tujuh) Unit dan terealisasi 7 (tujuh) unit yang terdiri dari gedung kantor 7 paket, taman 12 paket, mebelair Bidang Dafdatap 1 Paket, pembuatan kamar mandi 1 paket, atau tercapai sebesar 100%.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp728.110.710,00 dan terealisasi sebesar Rp692.463.516,86 atau sebesar 95,10%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Adalah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 unit dan terealisasi sebanyak 12 unit yang terdiri dari Genset, Mesin Ketik, Mesin Fotocopy, Alat Kantor Lainnya, Mebel, AC, Alat Pemadam Kebakaran, PC, laptop, printer, atau tercapai sebesar 100%.

- 8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (UPTD Pengelolaan Dana dan Penanaman Modal).
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp624.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp622.282.981,00 atau sebesar 99,72%.
 - b. Target Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD adalah Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 9 (sembilan) unit kerja dan terealisasi sebanyak 9 (sembilan) unit kerja atau sebesar 100%.
 - a) Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp624.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp622.282.981,00 atau sebesar 99,72%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD Adalah Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 9 (sembilan) unit kerja dan terealisasi sebanyak 9 (sembilan) unit kerja yang terdiri dari (Laporan Dana Penguatan Modal untuk 9 unit kerja meliputi : Bagian Perekonomian, Setda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas PMK, Dinas Pariwisata, Dinas Petanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas P3A2KB), atau capaian sebesar 100%.

Gambar 2. 7
Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman, didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 23 sub kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp524.082.239.369,00 dan terealisasi sebesar Rp508.317.564.778,00 atau sebesar 96,99%.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu telah terealisasi 100% dari target 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Realisasi diperoleh dari dokumen

anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh dokumen anggaran yang disusun dikalikan 100%.

Indikator nilai kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran telah terealisasi sebesar 10,14 dari target 11 sehingga memperoleh capaian sebesar 92,18%. Capaian diperoleh dari Nilai dimensi kesesuaian dokumen perencanaan tahun n-1 dan dokumen penganggaran tahun n-1 pada pengukuran IPKD.

Pada indikator persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah telah terealisasi 100% dari target 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Realisasi diperoleh dari jumlah dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dari laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dibagi dengan jumlah SP2D yang seharusnya diterbitkan dan laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dikalikan 100%.

Selanjutnya pada indikator persentase kesesuaian SP2D dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) perangkat daerah telah terealisasi sebesar 92,84% dari target 91,21% sehingga memperoleh Capaian sebesar 101,79%. Realisasi diperoleh dari jumlah SP2D dibagi dengan SPD dikalikan 100%. Capaian diatas 100% didukung oleh Strategi optimalisasi percepatan belanja daerah dan Evaluasi realisasi belanja melalui Rakordal level pimpinan secara rutin serta adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memantau realisasi fisik dan keuangan.

Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Realisasi diperoleh dari raperda pertanggungjawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda pertanggungjawaban APBD dikalikan 100%.

Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu telah terealisasi sebesar 100% dari target

82% sehingga memperoleh capaian sebesar 121,95%. Realisasi diperoleh dari Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikalikan 100. Capaian diatas 100% dikarenakan penyampaian laporan keuangan dilakukan tepat waktu oleh seluruh OPD.

Persentase ketepatan waktu penyaluran bantuan keuangan penunjang urusan keuangan kewenangan pengelolaan keuangan daerah telah terealisasi sebesar 98,84% dari target 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 98,84%. Realisasi diperoleh dari jumlah proposal yang disalurkan tepat waktu dibagi jumlah proposal dikali 100%. Capaian dibawah 100% dikarenakan jumlah proposal yang disalurkan tepat waktu sejumlah 85 proposal sedangkan yang seharusnya 86 proposal yang disalurkan tetapi 1 proposal lainnya telah dikerjakan oleh OPD lain sehingga capaian menjadi tidak dapat 86 proposal yang disalurkan tepat waktu atau tidak dapat memperoleh capaian 100%.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.778.665.675,00 dan terealisasi sebesar Rp1.587.600.858,00 atau sebesar 89,26%.
 - b. Target Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah regulasi pengelolaan keuangan daerah yang disusun 5 (lima) dokumen dan terealisasi sebesar 5 (lima) dokumen atau sebesar 100%.
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp70.708.875,00 dan terealisasi sebesar Rp69.451.462,00 atau sebesar 98,22%.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS adalah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari (1 dokumen KUA 2026, 1 dokumen PPAS 2026) atau capaian 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar Rp42.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.144.844,00 atau sebesar 98,56%.
 - b. Target Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari 1 Dokumen Perubahan KUA 2025, 1 Dokumen Perubahan PPAS 2025, atau capaian 100%.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD sebesar Rp6.843.750,00 dan terealisasi sebesar Rp6.079.673,00 atau sebesar 88,84%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS adalah jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi 86 dokumen dan terealisasi sebesar 86 dokumen atau tercapai 100%.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp6.843.750,00 dan terealisasi sebesar Rp6.406.703,00 atau sebesar 93,61%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD adalah jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 86 dokumen dan terealisasi sebesar 86 dokumen atau tercapai 100%.
- e) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD sebesar Rp12.403.125,00 dan terealisasi sebesar Rp7.148.500,00 atau sebesar 57,63%. Realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan dari target yang di capai, dikarenakan target sudah mencapai 100% sehingga dilakukan efisiensi anggaran pada bulan November.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD adalah Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi 86 dokumen dan terealisasi sebesar 86 dokumen atau tercapai 100%.
- f) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp13.903.125,00 dan terealisasi sebesar Rp13.336.427,00 atau sebesar 95.92%.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD 2026 serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2026, atau tercapai 100%.
- g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar Rp82.552.500,00 dan terealisasi sebesar Rp82.291.557,00 atau sebesar 99,68%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Adalah Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan APBD 2025 serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2025, atau tercapai 100%.
- h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sebesar Rp477.415.950,00 dan terealisasi sebesar

Rp363.637.092,00 atau sebesar 76,17%. Capaian keuangan dibawah 85% dikarenakan kebutuhan sudah mencapai target 100%. Dan anggaran telah dilakukan efisiensi pada bulan November. Tidak ada kendala yang dihadapi, akan tetapi dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari perangkat daerah dan lembaga negara lainnya yang terkait sehingga memerlukan penyesuaian waktu dan koordinasi lebih lanjut.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran adalah jumlah dokumen regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran 3 (tiga) dokumen dan terealisasi sebesar 3 (tiga) dokumen yang terdiri dari Keputusan Bupati Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan pada Perubahan APBD Tahun 2025, Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) Tahun 2025, dan Keputusan Bupati Revisi Petunjuk Pengelolaan APBD, dengan capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar Rp709.247.775,00 dan terealisasi sebesar Rp686.266.585,00 atau sebesar 96,76%.
- b. Target Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah Jumlah Penerbitan SP2D yang tepat waktu 9.500 (sembilan ribu lima ratus) SP2D dan terealisasi sebesar 9.653 (sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga) SP2D atau sebesar 101,61%.
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp125.190.475,00 dan terealisasi sebesar Rp117.533.319,00 atau sebesar 93,88%.
- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen yang terdiri dari Laporan Deposito (12), Laporan Posisi Kasda di RKUD per triwulan (4), dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Dana Kas Daerah dengan Bank (12), dengan capaian kinerja 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebesar R 153.967.875,00 dan terealisasi sebesar Rp148.684.758,00 atau sebesar 96,57%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen SPD per SKPD (48), dokumen rekapitulasi SPD Kabupaten (2), dengan capaian kinerja 100%.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi,

Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp95.036.100,00 dan terealisasi sebesar Rp90.757.284,00 atau sebesar 95,50%.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen yang terdiri dari Laporan Konfirmasi Transfer per triwulan (4 laporan), Laporan Dana Transfer per jenis dana (2 laporan), atau kinerja tercapai 100%.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp246.186.150,00 dan terealisasi sebesar Rp244.972.227,00 atau sebesar 99,51%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 (dokumen dan terealisasi sebesar 12 dokumen yang terdiri dari

Dokumen Register Pemotongan Iuran Jaminan Kematian, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Dokumen IWP (Taspen) dokumen, Pemrosesan dokumen gaji ASN Kabupaten Sleman 48 SKPD) selama 12 bulan, dengan capaian 100%.

- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp21.129.675,00 dan terealisasi sebesar Rp19.751.999,00 atau sebesar 93,48%.
 - b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 12 laporan dan terealisasi sebesar 12 laporan yang terdiri dari

- (Register pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)), dengan capaian realisasi 100%.
- f) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sebesar Rp67.737.500,00 dan terealisasi sebesar Rp64.566.998,00 atau sebesar 95,32%.
 - b. Target Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait adalah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait 12 dokumen dan terealisasi sebesar 12 dokumen yang terdiri dari dokumen pengajuan SP2D yang terverifikasi, Register pencairan SP2D, 9.653 SP2D, Aplikasi KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), laporan pelaksanaan KKPD, atau capaian realisasi 100%.
- 3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar Rp727.689.425,00 dan terealisasi sebesar Rp717.280.524,00 atau sebesar 98,57%.
 - b. Target Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah persentase ketepatan waktu penyusunan

Raperda pertanggungjawaban APBD 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

a) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp41.599.975,00 dan terealisasi sebesar Rp41.174.350,00 atau sebesar 98,98%.

b. Target Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan yang terdiri dari rekonsiliasi pendapatan 1 laporan, rekonsiliasi kas bendahara pengeluaran 1 laporan, rekonsiliasi penyetoran pajak pusat 1 laporan, dengan capaian realisasi 100%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp446.459.500,00 dan terealisasi sebesar Rp443.549.076,00 atau sebesar 99,35%.

- b. Target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota adalah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebesar 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, atau tercapai 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar Rp228.998.250,00 dan terealisasi sebesar Rp222.956.497,00 atau sebesar 97,36%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1

- (satu) dokumen dan terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen yang terdiri dari pengembangan SIKD sebagai sistem back up SIPD, dengan capaian realisasi 100%.
- d) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.631.700,00 dan terealisasi sebesar Rp9.600.601,00 atau sebesar 90,30%.
- b. Target Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 150 orang dan terealisasi sebesar 150 orang pengelola keuangan dan pembuku pada perangkat daerah yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta tersusunnya SK Bendahara, capaian realisasi 100%.
- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp521.234.512.028,00 dan terealisasi sebesar Rp505.326.416.811,00 atau sebesar 96,95%.
- b. Target Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah persentase ketepatan waktu penyaluran bantuan keuangan 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.
- a) Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah

- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp35.851.350,00 dan terealisasi sebesar Rp34.292.162,00 atau sebesar 95,65%.
- b. Target Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah adalah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan yang terdiri dari Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen, dengan capaian realisasi 100%.
- b) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar Rp386.062.182.185,00 dan terealisasi sebesar Rp385.847.584.215,00 atau sebesar 99,94%.
 - b. Target Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan adalah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan yang terdiri dari penyaluran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, kabupaten lain dan provinsi, atau kinerja tercapai 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp17.428.282.828,00 dan terealisasi sebesar Rp14.934.412.908,00 atau sebesar 85,69%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Dana Darurat dan Mendesak 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan yang terdiri dari penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan bencana, belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi tahun sebelumnya, sehingga capaian realisasi 100%.

- d) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota sebesar Rp117.708.195.665,00 dan terealisasi sebesar Rp104.510.127.526,00 atau sebesar 88,79%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan yang terdiri dari penyaluran belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kalurahan, atau kinerja tercapai 100%.

Gambar 2. 8
Dokumentasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan BKAD Kabupaten Sleman, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp2.073.577.575,00 dan terealisasi sebesar Rp1.968.790.047,00 atau sebesar 94,95%. Dalam program ini memiliki 1 sub kegiatan yang di kelola oleh UPTD Stadion Maguwoharjo total anggaran yang di alokasikan sebesar Rp6.041.041.465,00 dan terealisasi sebesar Rp5.800.148.531,00 atau sebesar 96,01%.

Program Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IP BMD)/Indeks Pengelolaan Aset.

Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A telah terealisasi 87,50% dari target 90% sehingga memperoleh capaian sebesar 97,22%. Realisasi diperoleh dari Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen. Indeks pengelolaan barang milik daerah (IP BMD)/Indeks pengelolaan aset telah terealisasi 2,88 (Baik) dari target 2,65 (Baik) sehingga memperoleh capaian sebesar 108,68%. Realisasi diperoleh dari Hasil perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) berdasarkan formulasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Program Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp2.073.577.575,00 dan terealisasi sebesar Rp1.968.790.047,00 atau sebesar 94,95%.
- c. Target Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah tepat waktu 100% dan terealisasi sebesar 100%
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebesar Rp385.364.700,00 dan terealisasi sebesar Rp376.486.652,00 atau sebesar 97,70%.

- b. Target Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah 1 (satu) Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen yang terdiri dari hasil pengukuran peta bidang tanah, dan nilai valuasi tanah, sertifikasi tanah milik pemda, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Kabupaten Sleman, atau tercapai 100%
- b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar Rp229.903.800,00 dan terealisasi sebesar Rp228.267.030,00 atau sebesar 99,29%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan, Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET) dan Sistem Informasi Persediaan (SIDIAN), dan Pengukuran IP BMD (tahun 2024 tahun pengukuran 2025) atau tercapai 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar Rp955.884.875,00 dan terealisasi sebesar Rp897.285.264,00 atau sebesar 93,87%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan yang terdiri dari laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tagihan telepon 12 bulan, tagihan air 12 bulan, tagihan listrik 12 bulan, pemeliharaan BMD 12 Bulan, atau tercapai 100%.

- d) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp439.574.200,00 dan terealisasi sebesar Rp405.106.150,00 atau sebesar 92,16%.
 - b. Target Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah adalah 1 (satu) dokumen dan terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen yang terdiri dari SK Penghapusan (15), Perjanjian Pemindahtanganan BMD, Perjanjian Pemanfaatan BMD, atau tercapai 100%.
- e) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp62.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.644.951,00 atau sebesar 98,08%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan terealisasi seluruhnya atau realisasi capaian 100%.
- f) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp62.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.644.951,00 atau sebesar 98,08%.

- b. Target Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan terealisasi seluruhnya atau realisasi capaian 100%.
- g) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPTD Stadion Maguwoharjo)
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp6.041.041.465,00 dan terealisasi sebesar Rp5.800.148.531,00 atau sebesar 96,01%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) laporan atau realisasi capaian 100%.

Gambar 2. 9
Dokumentasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini Adalah sebesar Rp17.447.755.252,00 dan terealisasi sebesar Rp16.732.621.229,00 atau sebesar 95,90%.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan penerimaan

pajak dan retribusi daerah, Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

Tabel 2. 9 Data Perkembangan Capaian Kinerja Pendapatan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar):	Rp	803,68	1.061,06	1.130,16	1.184,13	1.484,60
	• Pajak Daerah (dalam milyar)		511,41	763,13	833,22	851,52	1.112,32
	• Retribusi Daerah (dalam milyar)		38,70	40,44	41,79	250,86	234, 9
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (dalam milyar)		38,16	38,87	38,70	43,66	44,64
	• Lain-lain PAD yang Sah (dalam milyar)		215,41	218,63	216,45	38,10	92,66
2.	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah (%)	%	1,81	26,1	22,28	25,58	22.22%
3.	Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	indeks	82,85	81,94	84,54	85	85.91%

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah telah terealisasi 22,22% dari target 25,75% sehingga memperoleh capaian sebesar 86,29%. Realisasi diperoleh dari jumlah penerimaan pajak sebesar Rp11.123.22.393.221.75 dan retribusi daerah sebesar

Rp234.969.925.115 pada tahun 2025 dikurangi penerimaan pajak dan retribusi daerah n-1 dibagi dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp851.515.175.943 dan retribusi daerah sebesar Rp250.838.782.616 tahun 2024 dikalikan 100%.

Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah telah terealisasi 85,91% dari target 85,20% sehingga memperoleh capaian sebesar 100,83%. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah terealisasi 85,91% dari target 85,20% sehingga memperoleh capaian sebesar 100,83%. Realisasi diperoleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pajak daerah.

Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah telah terealisasi 44,40% dari target 37,5% sehingga memperoleh capaian sebesar 118,41%. Realisasi diperoleh dari Jumlah realisasi PAD sebesar Rp1.484.619.677.203,74 dibagi total pendapatan daerah sebesar Rp3.343.411.695.281,58 dikalikan 100.

Rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah terealisasi 46,74% dari target 36,37% sehingga memperoleh capaian sebesar 128,51%. Realisasi diperoleh dari Jumlah Realisasi PAD sebesar Rp1.484.619.677.203,74 dibagi realisasi APBD sebesar Rp3.176.338.114.450,52 dikalikan 100.

Rasio pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) telah terealisasi 1,75% dari target 1,39% sehingga memperoleh capaian sebesar 125,66%. Realisasi diperoleh dari Jumlah realisasi pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp1.112.322.393.221.75 dibagi PDRB berdasarkan nilai konstan sebesar Rp63.683.200.000.000 dikalikan 100.

Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah telah terealisasi 30,63% dari target 2,25% sehingga memperoleh capaian sebesar 1361,27%. Realisasi diperoleh dari Jumlah pajak yang diterima tahun 2025 sebesar Rp1.112.322.393.221.75 dikurangi jumlah pajak tahun 2024 sebesar Rp851.515.175.943 dibagi jumlah pajak yang diterima tahun 2024 dikalikan 100.

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp17.447.755.252,00 dan terealisasi sebesar Rp16.732.621.229,00 atau sebesar 95,90%
- b. Target Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 210 Wajib Pajak dan terealisasi seluruhnya atau setara dengan 100%
 - a) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp112.885.125,00 dan terealisasi sebesar Rp112.695.384,00 atau sebesar 99,83%.
 - b. Target Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Dokumen Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah dan seluruh dokumen telah terealisasi dengan capaian 100% .
 - b) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp106.567.625,00 dan terealisasi sebesar Rp104.195.331,00 atau sebesar 97,77%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah 8 (delapan) Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan terealisasi seluruhnya atau setara dengan 100%

- c) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp431.660.075,00 dan terealisasi sebesar Rp391.210.935,00 atau sebesar 90,63%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 86 Laporan dan terealisasi sebanyak 86 Laporan yang terdiri dari 86 Dokumen Laporan Pemutakhiran basis data PBB P2 atau tercapai 100%.
- d) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp143.854.875 dan terealisasi sebesar Rp123.709.987,00 atau sebesar 86,00%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 20.000 Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya dan terealisasi sebanyak 19.257 SSPD atau tercapai 96,29%.
- e) Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar Rp490.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp401.390.279,00 atau sebesar 81,83%.

- b. Target Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah 667.000 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan terealisasi sebanyak 642.243 SPPT PBBP2 atau tercapai 96,29%.
- f) Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar Rp1.033.618.625,00 dan terealisasi sebesar Rp919.138.245,00 atau sebesar 88,92%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10.000 Layanan (Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah) dan terealisasi sebanyak 24.489 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah atau tercapai 244,89%.
- g) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp245.260.925,00 dan terealisasi sebesar Rp200.193.823,00 atau sebesar 81,62%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 3.800 Dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang telah diverifikasi dan diteliti terealisasi seluruhnya atau setara dengan 100%.
- h) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp11.367.756.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.351.794.916,00 atau sebesar 99,86%.
 - b. Target Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen dan terealisasi 12 dokumen atau 100% yang terdiri dari Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Rekon Bank, Penagihan dengan Surat

Teguran, Rekon Piutang) , Laporan Pelaksanaan Penghargaan PBB P2, Restitusi, BA Penatausahaan Piutang, Reversal Pajak Daerah, Laporan Lunas Padukuhan.

- i) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebesar Rp143.863.700,00 dan terealisasi sebesar Rp142.825.281,00 atau sebesar 99,28%.
 - c. Target Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 500 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan terealisasi 592 Dokumen yang terdiri dari Dokumen Surat Surat Jawaban Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah atau capaian realisasi 118%.
- j) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rp3.242.604.702,00 dan terealisasi sebesar Rp2.856.947.548,00 atau sebesar 88,11%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 33 dokumen yang terdiri dari Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan terealisasi 33 LHP pemeriksaan pajak dan 40.000 data PKB BBNKB atau setara dengan 100%.
- k) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan Rp129.148.600,00 dan terealisasi sebesar Rp128.519.500,00 atau sebesar 99,51%.
 - b. Target Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12

Laporan yaitu Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan terealisasi 13 Dokumen yang terdiri dari 12 Dokumen Gaji Non ASN dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah) atau capaian realisasi 100%.

Gambar 2. 10
Dokumentasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Adapun permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan antara lain:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENDAPATAN	
	- Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat: - Daya beli masyarakat menurun akibat inflasi, pengangguran, atau krisis ekonomi, sehingga kemampuan membayar pajak juga melemah - Kesadaran pajak rendah karena masyarakat lebih fokus pada kebutuhan dasar dibanding kewajiban pajak - Perubahan Perilaku Wajib Pajak : - Munculnya pola konsumsi baru (misalnya transaksi digital, e-commerce) yang belum sepenuhnya terjangkau regulasi pajak daerah - Adanya resistensi: sebagian wajib pajak menunda atau menghindari pembayaran - Mobilitas tinggi: wajib pajak bisa berpindah domisili atau berganti usaha dengan cepat, sehingga sulit dilacak - Keterbatasan dan Ketidakakuratan Data Pajak: - Data wajib pajak yang tercatat tidak update (nomor telepon tidak aktif) - Terdapat SPPT yang masih pekarangan sementara faktanya telah berdiri bangunan	- Perlunya membuat skema keringanan pajak untuk berupa potongan, penundaan, atau cicilan bagi wajib pajak yang terseleksi; - Perlunya membuat skema keringanan pajak untuk berupa potongan, penundaan, atau cicilan bagi wajib pajak yang terseleksi; - Integrasi data antar instansi: menghubungkan data pajak daerah dengan data kependudukan, perizinan usaha, dan catatan keuangan serta pemutakhiran data berkala; - Melakukan sosialisasi terkait pajak daerah dan pendampingan terhadap Calon Wajib Pajak Daerah selama proses pendaftaran wajib pajak baru sampai dengan pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat; - Melakukan pemantauan dari sosial media dan peninjauan secara langsung di lapangan untuk menemukan objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah; - Melakukan pelayanan pemutakhiran SPPT PBB-P2 baik secara offline melalui loket pelayanan PBB-P2 BKAD Kabupaten Sleman dan online melalui website https://simpelpbb.slemankab.go.id/; - Melakukan program basis data

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	4. Calon Wajib Pajak kurang kooperatif dalam proses pendaftaran wajib pajak baru hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal: A. Kurangnya pengetahuan terkait pajak daerah dari pemilik objek pajak B. Penghindaran pajak oleh pemilik objek pajak C. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sleman 5. Data Potensi calon wajib pajak baru masih terbatas karena luasnya wilayah Kabupaten Sleman dan terbatasnya jumlah personil Staff Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan; 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memutakhirkan data SPPT PBB-P2; 7. Data SPPT PBB-P2 masih belum termutakhirkan sehingga sulit menemukan pemilik dari SPPT PBB-P2 dan menyebabkan SPPT PBB-P2 tidak tertagih; 8. Alamat peminjam DPM sulit ditemukan terlebih apabila terdapat perubahan Alamat; 9. Masih ditemukan pelaksana event tidak tertib membayar retribusi sesuai perbup no 92 tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;	PBB-P2 melalui kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dan Dukuh di seluruh Kabupaten Sleman; Melakukan kajian dalam rangka upaya digitalisasi sistem pengelolaan dana penguatan modal yang juga dapat diakses oleh perangkat daerah teknis terkait sebagai upaya penertiban.
2	PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN	

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	1. Penandatanganan SP2D secara manual yang menghambat percepatan pencairan; 2. Gangguan jaringan SIPD dan jadwal maintenance yang tidak menentu dapat menghambat proses perencanaan anggaran dan penatausahaan keuangan; 3. Informasi terkait pedoman penyusunan anggaran dan informasi transfer ke daerah dari pusat yang tidak tepat waktu; 4. Penyaluran bantuan transfer ke kalurahan tidak sesuai dengan jadwal /keterlambatan penyaluran dana transfer ke kalurahan karena rekomendasi dari dinas PMK belum ada karena kalurahan belum menyampaikan laporan sesuai ketentuan.	1. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada OPD dalam rangka penatausahaan keuangan Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat secara kontinyu; 2. Mengajukan permohonan ke Kemendagri untuk membuat TTE BUD/Kuasa BUD dan PA; Koordinasi dan mengajukan surat ke Kemendagri terkait penyelesaian permasalahan jaringan; Mengajukan permohonan ke Kemendagri untuk membuat TTE BUD/Kuasa BUD dan PA; Koordinasi dan mengajukan surat ke Kemendagri terkait penyelesaian permasalahan jaringan. 3. Kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan dari dana transfer; 4. Melakukan koordinasi intensif dengan Dinas PMK untuk : A. Dinas PMK segera menyusun/mengeluarkan surat edaran pencairan dana transfer kalurahan B. Jemput bola dan monitoring langsung kepada kalurahan yang belum menyampaikan laporan sesuai ketentuan
3	Pengelolaan BMD 1. Pengadaan Tanah Dokumen yang harus disiapkan oleh ahli waris dari pemilik tanah yang akan dibeli tidak pasti 2. Pemeliharaan BMD Kebutuhan pemeliharaan BMD tidak dapat diprediksi	1. Pengadaan Tanah Seawal mungkin jemput bola melakukan pendekatan ahli waris untuk melengkapi dokumen pelepasan tanah 2. Pemeliharaan BMD Melakukan koordinasi intensif dengan OPD dan melakukan penilaian BMD secara berkala sehingga dapat memprediksi dan menyiapkan kebutuhan anggaran anggaran BMD

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	3. Pengadaan sarpras Sistem pembayaran di inaproc belum terintegrasi dengan Sistem penatausahaan keu di SIPD	3. Pengadaan sarpras Melakukan pembayaran secara manual (SIMBAJA)
	4. Penatausahaan BMD Beberapa rekening dan kode barang input nya harus menunggu akhir tahun (tergantung karakteristik pekerjaan di OPD)	4. Penatausahaan BMD Pendampingan langsung secara intensif ke OPD
	5. Pengelolaan Stadion Masih ditemukan pelaksana event tidak tertib membayar retribusi sesuai perbup no. 92 tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5. Pengelolaan Stadion Mendetailkan isi perjanjian kerja sama pemanfaatan stadion terutama terkait kewajiban pembayaran retribusi dan sanksi serta komunikasi intensif dengan pelaksana event

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN

A. DANA KEISTIMEWAAN

1. Urusan Kelembagaan

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Dalam pelaksanaannya, keistimewaan Jogja didukung oleh dana keistimewaan yang pelaksanaannya disebar ke 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten Sleman sebagai bagian dari DIY memegang peranan dalam menyukseskan Keistimewaan Yogyakarta. BKAD Kabupaten Sleman selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berperan dalam memastikan dan memproses ketersediaan dana keistimewaan yang dibutuhkan perangkat daerah.

b. Capaian kinerja Anggaran

Pada pelaksanaannya secara operasional ketugasan BKAD Kabupaten Sleman pada tahun 2025 terwadahi pada Urusan Sekretariat Daerah melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan dengan anggaran sebesar Rp. 73.516.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp72.628.170 terserap 98,79%. Adapun target output dari sub kegiatan tersebut adalah 1 (satu) laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan, realisasi output 100%.

c. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

**1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan oleh BKAD kabupaten Sleman, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub. kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp73.516.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.628.170,00 atau sebesar 98,79%.

Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan telah terealisasi 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari jumlah laporan realisasi surat perintah pencairan dana urusan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang tersedia dibagi jumlah laporan realisasi surat perintah pencairan dana urusan keistimewaan yang seharusnya tersedia dikalikan 100%.

- a. Kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan
 - a) Total Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp73.516.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.628.170,00 atau sebesar 98,79%.
 - b) Target kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan 3 (tiga) laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan yang terdiri dari

dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan DIY (4 dokumen), monitoring dan evaluasi realisasi SP2D, monitoring dan evaluasi Surat Tanda Setoran (STS) sisa SP2D per semester untuk 4 (empat) urusan yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

(1) Sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan

(a) Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp73.516.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.628.170,00 atau sebesar 98,79%.

(b) Target kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan 4 (empat) Laporan dan terealisasi sebesar 4 (empat) laporan yang terdiri dari dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan DIY (4 dokumen), monitoring dan evaluasi realisasi SP2D, monitoring dan evaluasi Surat Tanda Setoran (STS) sisa SP2D dan 4 (empat) urusan yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 1 Permasalahan dan Solusi Dana Keistimewaan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Target indikator kinerja kegiatan Dana Keistimewaan mengacu pada RPJMD Provinsi DIY.	Koordinasi dan sinkronisasi target indikator kinerja Dana Keistimewaan bersama Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.
2.	Jadwal penetapan anggaran final Dana Keistimewaan melalui penandatanganan Berita Acara Dana Keistimewaan DIY dilakukan pada awal tahun berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian kembali pada postur APBD Kabupaten Sleman di tahun anggaran melalui proses revisi anggaran dan penyesuaian alokasi anggaran kas	Koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah DIY , Bappeda , dan OPD Pelaksana Urusan Keistimewaan DIY dalam rangka sinkronisasi kegiatan sesuai Berita Acara.

sumber: BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD mendapatkan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya DPRD memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti Bupati. Berikut rekomendasi dan tindak lanjut terkait rekomendasi bidang keuangan.

Tabel 4. 1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2025 Atas Catatan Rekomendasi LKPJ Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
1	Kajian potensi pajak daerah dan retribusi yang detail untuk tiap jenis pajak dan retribusi agar mendapatkan informasi potensi pajak yang akurat	Penyusunan data potensi setiap jenis pajak dan retribusi	Desember 2025	April sd Desember 2025	BKAD	Pengumpulan data potensi wajib pajak dan potensi wajib retribusi dari perangkat daerah terkait	Sudah dikumpulkan data potensi wajib pajak dan potensi wajib retribusi dari perangkat daerah terkait
2	Pengembangan potensi-potensi pendapatan dari pemanfaatan aset-aset daerah yang dikelola oleh perangkat daerah terkait	1. Menginventarisir potensi aset daerah di setiap perangkat daerah	Desember 2025	Januari sd Desember 2025	BKAD	Evaluasi pendapatan retribusi aset daerah setiap triwulan	Sudah dilakukan Inventarisasi dan Evaluasi
		2. Berkoordinasi dengan perangkat daerah pengelola					
3	Memperkuat kelembagaan perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk optimalisasi PAD baik di level strategis, manajerial dan teknis operasional	1. Mengumpulkan daftar inventaris masalah yang dihadapi perangkat daerah dalam pemungutan PAD	Desember 2025	Januari sd Desember 2025	BKAD	Evaluasi pendapatan retribusi aset daerah setiap triwulan	Evaluasi pendapatan retribusi aset daerah setiap triwulan
		2. Menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan					Tidak pernah melakukan

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
4	Memperkuat kinerja BUMD agar mampu mengembangkan layanan menghasilkan keuntungan tahunan berupa deviden serta mampu memberi manfaat yang riil bagi masyarakat	Melakukan rapat koordinasi dengan BUMD untuk menggali kebutuhan, kendala, peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tahun 2025	Tahun 2025	BKAD dan BUMD	a. BPD: 31.655.502.918,00 b. Bank Sleman : 9.340.662.495,00 c. PDAM : 3.081.846.548,00 d. BUKP : 322.741.830,00	a. BPD: 31.655.502.918,00 b. Bank Sleman : 9.340.662.495,00 c. PDAM : 3.081.846.548,00 d. BPRS Sleman : 518.664.193,00 e. BUKP : 322.741.830,00 Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan BUMD untuk menggali kebutuhan, kendala, peluang dan tantangan pelayanan kepada masyarakat, sehingga peningkatan penyertaan modal pada tahun berikutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
							berimplikasi pada peningkatan Deviden kepada Pemda
5	Mengupayakan efektivitas anggaran untuk memprioritaskan alokasi pada belanja yang mempunyai dampak langsung pada masyarakat atau yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di Sleman, dengan cara:						
	a. Menekan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD	a. Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, sehingga dibutuhkan kenaikan APBD untuk memperkecil persentase belanja pegawai terhadap APBD	a. Maksimal tahun 2027 belanja pegawai wajib maksimal 30% APBD	a. Tahun 2027	a. Seluruh perangkat daerah kabupaten Sleman		Pada Perubahan APBD 2025 belanja pegawai sebesar 39,02%

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
	b. Memperbesar belanja modal hingga 40% dari APBD disatu tahun fiskal	b. Untuk meningkatkan persentase belanja modal maka harus dibarengi dengan efisiensi belanja operasional, seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat, belanja narasumber, belanja kajian dan belanja operasional lain yang tidak mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah	b. Maksimal tahun 2027 belanja infrastruktur wajib mencapai 40% APBD	b. Tahun 2026 – 2027	b. Seluruh perangkat daerah kabupaten Sleman	Pada perubahan KUA PPAS tahun 2025, belanja infrastruktur sebesar 31,58%	Pada Penetapan PAPBD Tahun 2025, Belanja Infrastruktur sebesar 31.84 %

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
6	Penyusunan LKPJ yang lebih komprehensif, khususnya untuk mengatur kinerja BUMD, tidak sekedar menginformasikan perolehan dividen tapi juga memuat analisis strategis dan kebijakan BUMD ditahun tersebut, sehingga bisa diukur apakah BUMD tersebut benar-benar telah berkontribusi optimal pada pencapaian tujuan pembangunan daerah	Akan kami tindaklanjuti untuk penyusunan LKPJ yang akan datang, dengan memperhatikan analisis strategis dan kebijakan yang dijalankan BUMD selama tahun berjalan	Tahun 2025	Tahun 2025	Bagian Pemerintahan BKAD, dan BUMD	Berkoordinasi dengan BUMD	Hasil koordinasi dengan BUMD sebagai berikut: 1. Bank Sleman a. Kondisi keuangan secara kewajiban penyertaan modal minimum yang sehat diatas 15%, posisi tahun ini di angka 42,96% b. likuiditas dalam kondisi baik pada posisi 21,27 c. tetap berkomitmen untuk menjadi salah satu penyumbang PAD 1. BPRS Sleman Total aset realisasi Desember 2025 sebesar Rp78.912.228.025, proyeksi akhir 2026 sebesar Rp89.500.998.124. Penghimpunan

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
							Dana akhir Desember 2025 sebesar Rp42.896.625.915 proyeksi akhir tahun 2026 sebesar Rp51.156.046.190 Penyaluran Dana akhir Desember 2025 sebesar Rp52.233.153.548 proyeksi Desember 2026 sebesar Rp69.278.732.656 Ekuitas akhir 2025 sebesar Rp21.968.769.508 proyeksi akhir 2026 sebesar Rp27.185.288.538 Laba/Rugi akhir 2025 sebesar Rp1.108.535.266 proyeksi akhir 2026 sebesar

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
							Rp1.190.993.859 Renc 3. PDAM Sleman Laba PDAM Sleman tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024. Indikator2 pencapaian PDAM bisa ditambahkan pada indikator terkait peningkatan kualitas kesehatan sampai pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya pemasangan jaringan PDAM di wilayah tersebut.

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
7	- Dalam dokumen LKPJ agar dipaparkan lebih rinci penjelasan tentang Investasi Pemerintah Daerah sehingga lebih informatif, Adapun rincian informasi yang perlu disajikan antara lain : - BUMD yang mendapat penyertaan modal; - Total investasi yang telah dilakukan		Tahun 2025	Tahun 2025	Bagian Pemerintahan BKAD, dan BUMD		Isi dari dokumen LKPJ akan disesuaikan sesuai rekomendasi

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
	sampai dengan tahun pertanggungjawaban, termasuk total investasi yang ditanamkan ke masing-masing BUMD; c. Jumlah hasil investasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya atas investasi yang						

No	Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024	Rencana Tindak Lanjut 2024	Target (Waktu)	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status / Progres Penyelesaian (Akhir Tahun 2024)	Status / Progres Penyelesaian Tahun 2025
	sudah ditanamkan.						

- **Rekomendasi 1:** Kajian potensi dan retribusi yang detail untuk tiap jenis pajak dan retribusi agar mendapatkan informasi potensi pajak yang akurat.

Yang dilaksanakan tahun 2025:

Telah dilakukan penyusunan data potensi setiap jenis pajak dan retribusi (terkumpulnya data potensi wajib pajak dan potensi wajib retribusi dari perangkat daerah terkait).

- **Rekomendasi 2:** Mengembangkan potensi-potensi pendapatan dari pemanfaatan aset-aset daerah yang dikelola oleh perangkat daerah terkait.

Yang dilaksanakan tahun 2025:

1. Telah menginventarisir potensi aset daerah di setiap perangkat daerah (Telah melakukan inventarisasi dan evaluasi)
2. Telah berkoordinasi dengan perangkat daerah pengelola

- **Rekomendasi 3:** Memperkuat kelembagaan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi untuk optimalkan PAD baik di level strategis, manajerial dan teknis operasional..

Yang dilaksanakan tahun 2025:

1. Telah mengumpulkan daftar inventaris masalah yang dihadapi perangkat daerah dalam pemungutan PAD
2. Telah menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan

- **Rekomendasi 4:** Memperkuat kinerja BUMD agar mampu mengembangkan layanan yang mampu menghasilkan keuntungan tahunan berupa dividen mampu memberi manfaat yang riil bagi masyarakat secara langsung.

Yang dilaksanakan tahun 2025:

Telah melakukan rapat koordinasi dengan BUMD untuk menggali kebutuhan, kendala, peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, sehingga peningkatan penyertaan modal pada tahun berikutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan berimplikasi pada peningkatan Dividen kepada Pemda.

- a. BPD : 31.655.502.918,00
- b. Bank Sleman : 9.340.662.495,00

- c. PDAM : 3.081.846.548,00
- d. BPRS Sleman : 518.664.193,00
- **Rekomendasi 5:** Mengupayakan efektivitas anggaran untuk memprioritaskan alokasi pada belanja yang mempunyai dampak langsung pada Masyarakat atau yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di Sleman, caranya:
 - a. Menekan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, dan
 - b. Memperbesar belanja modal hingga 40% dari APBD di satu tahun fiskal

Yang dilaksanakan tahun 2025:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, sehingga dibutuhkan kenaikan APBD untuk memperkecil persentase belanja pegawai terhadap APBD, maksimal tahun 2027 belanja pegawai wajib maksimal 30% APBD (Pada Perubahan APBD 2025 belanja pegawai sebesar 39,02%)
- b. Untuk meningkatkan persentase belanja modal maka harus dibarengi dengan efisiensi belanja operasional, seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat, belanja narasumber, belanja kajian dan belanja operasional lain yang tidak mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maksimal tahun 2027 belanja infrastruktur wajib mencapai 40% APBD (Pada Penetapan PAPBD Tahun 2025, Belanja Infrastruktur sebesar 31.84 %)
- **Rekomendasi 6:** Penyusunan LKPJ yang lebih komprehensif, khususnya untuk mengukur kinerja BUMD. Tidak sekadar menginformasikan perolehan dividen tapi juga memuat analisis strategi dan kebijakan BUMD di tahun tersebut, sehingga bisa diukur apakah BUMD tersebut benar-benar telah berkontribusi optimal pada pencapaian tujuan Pembangunan daerah

Yang dilaksanakan tahun 2025:

Telah melakukan koordinasi dengan BUMD

Hasil koordinasi dengan BUMD sebagai berikut :

1. Bank Sleman

- a. Kondisi keuangan secara kewajiban penyertaan modal minimum yang sehat diatas 15%, posisi tahun ini di angka 42,96%
- b. likuiditas dalam kondisi baik pada posisi 21,27
- c. tetap berkomitmen untuk menjadi salah satu penyumbang PAD

2. BPRS Sleman

- a. Total aset realisasi Desember 2025 sebesar Rp. 78.912.228.025, proyeksi akhir 2026 sebesar Rp. 89.500.998.124.
- b. Penghimpunan Dana akhir Desember 2025 sebesar Rp. 42.896.625.915 proyeksi akhir tahun 2026 sebesar Rp. 51.156.046.190
- c. Penyaluran Dana akhir Desember 2025 sebesar Rp52.233.153.548 proyeksi Desember 2026 sebesar Rp69.278.732.656
- d. Ekuitas akhir 2025 sebesar Rp21.968.769.508 proyeksi akhir 2026 sebesar Rp27.185.288.538
- e. Laba/Rugi akhir 2025 sebesar Rp1.108.535.266 proyeksi akhir 2026 sebesar Rp1.190.993.859

3. PDAM Sleman

Laba PDAM Sleman tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024. Indikator2 pencapaian PDAM bisa ditambahkan pada indikator terkait peningkatan kualitas kesehatan sampai pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya pemasangan jaringan PDAM di wilayah tersebut.

- **Rekomendasi 7:** Dalam dokumen LKPJ agar dipaparkan lebih rinci penjelasan tentang Investasi Pemerintah Daerah sehingga lebih informatif, Adapun rincian informasi yang perlu disajikan antara lain :
 - d. BUMD yang mendapat penyertaan modal;
 - e. Total investasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun pertanggungjawaban, termasuk total investasi yang ditanamkan ke masing-masing BUMD;

- f. Jumlah hasil investasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya atas investasi yang sudah ditanamkan.

Yang dilaksanakan tahun 2025:

Lampiran Jawaban No 7 (Rencana Tindak Lanjut 2024) terhadap Tindak Lanjut 2025

No	Uraian	Jumlah Penyertaan Modal Berdasarkan Perda (Rp)	Jumlah Penyertaan yang telah disetorkan s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Penyertaan yang telah disetorkan s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Jumlah Modal yang belum disetorkan s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Modal yang belum disetorkan s.d 31 Desember 2025 (Rp)
1	PT BPR Bank Sleman (Perseroda)	329.274.999.760,00	207.716.276.000,00	217.716.276.000,00	121.558.723.760,00	111.558.723.760,00
2	PDAM Tirta Sembada	287.931.797.537,00	177.061.510.537,00	191.219.823.537,00	110.870.287.000,00	96.711.974.000,00
3	PT Bank BPD DIY	592.800.000.000,00	402.513.000.000,00	435.942.000.000,00	190.287.000.000,00	156.858.000.000,00
4	BUKP	2.489.034.722,00	2.489.034.722,00	2.489.034.722,00	-	-
5	PT BPR Syariah Sleman (Perseroda)	16.125.000.000,00	16.125.000.000,00	16.125.000.000,00	-	-
	Jumlah	1.228.620.832.019,00	805.904.821.259,00	863.492.134.259,00	422.716.010.760,00	365.128.697.760,00

BAB V

PENUTUP

Laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merepresentasikan capaian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Kabupaten Sleman. Laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan BKAD baik sebagai Perangkat Daerah maupun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Sampai dengan bulan Desember 2025 program dan kegiatan BKAD Kabupaten Sleman secara keseluruhan telah dilaksanakan. Secara fisik kegiatan yang berkaitan dengan tugas BKAD Kabupaten Sleman sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kegiatan di kesekretariatan dan proses administrasi untuk setiap kegiatan dapat dikatakan berjalan lancar. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal capaian fisiknya karena beberapa kendala yang mendasar. Hal ini menyebabkan penyerapan pada kegiatan tertentu yang kurang optimal capaian fisiknya juga kurang maksimal. Sampai dengan bulan Desember 2025 realisasi keuangan BKAD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Realisasi Keuangan BKAD Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	Rp3.056.803.643.410,00	Rp3.035.571.074.620,74	100,68
2	Belanja	Rp602.571.019.003,00	Rp580.467.444.581,86	96,33
3	Penerimaan Pembiayaan	Rp153.419.047.928,00	Rp153.419.047.928,02	100,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	Rp52.778.000.000,00	Rp52.778.000.000,00	100,00

sumber: LRA BKAD Kab. Sleman, Tahun 2025

Guna meningkatkan capaian kinerja BKAD Sleman, data pencapaian kegiatan baik itu capaian fisik maupun penyerapan anggaran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan kinerja BKAD Kabupaten Sleman di masa datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Matriks Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Lampiran 2

Data Inovasi Perangkat Daerah

Lampiran 3

Data Prestasi Perangkat Daerah

Lampiran 4

Laporan Capaian Indikator Kinerja Kunci dan Dokumen Pendukung

Lampiran 1

Matriks Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun Anggaran 2025

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2024

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET								
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	118.914.731.545,00	110.038.796.440,00	92,54%	-			
	Sekretariat Daerah	55.900.500,00	55.612.775,00	99,49%				
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	55.900.500,00	55.612.775,00	99,49%				
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	55.900.500,00	55.612.775,00	99,49%				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	55.900.500,00	55.612.775,00	99,49%				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se- DIY	-	-	-	Laporan	1	1	100%
1	URUSAN KEUANGAN	118.858.831.045,00	109.983.183.665,00	92.54%				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95.417.623.996,00	88.216.093.972,00	92,45%				
	1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				%	100,00	100,00	100,00%
	2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja				%	100,00	100,00	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.284.275,00	50.126.200,00	92,34%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.114.000,00	39.680.591,00	92,04%				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				dokumen	2	2	100,00%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500,00	1.603.512,00	90,98%				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				dokumen	1	1	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	891.600,00	798.686,00	89,58%				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PENYUSUSNAN Dokumen Perubahan RKA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.149.900,00	995.229,00	86,55%				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				dokumen	1	1	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.074.900,00	964.689,00	89,75%				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				dokumen	1	1	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.291.375,00	6.083.493,00	96,70%				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; adalah.							
	1 Dokumen laporan tahunan				dokumen	1	1	100,00%
	2 Dokumen LKjIP/Lakip				dokumen	1	1	100,00%
	3 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja (per triwulan)				dokumen	1	1	100,00%
	4 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja				dokumen	1	1	100,00%
	5 Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja (per triwulan)				dokumen	1	1	100,00%
	6 Dokumen laporan RFK (form sesuai bag pembangunan)				dokumen	1	1	100,00%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	7 Dokumen laporan bulanan (form sesuai bag pemerintahan)				dokumen	1	1	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.307.505.951,00	32.987.134.014,00	86,11%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.619.142.751,00	32.324.811.555,00	85,93%				
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Org/Bulan	90/12	90/12	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	601.900.000,00	576.982.700,00	95,86%				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	3	3	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	86.463.200,00	85.339.759,00	98,70%				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran. SKPD				laporan	5	5	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.058.214.600,00	989.322.060,00	93,49%				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.058.214.600,00	989.322.060,00	93,49%				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				dokumen	2	2	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.132.519.220,00	1.649.145.259,00	77,33%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.789.000,00	85.380.000,00	95,09%				
	1 jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan				paket	6	6	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.614.700,00	195.426.158,00	90,64%				
	1 jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan				paket	1	1	100,00%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	841.014.800,00	509.527.812,00	60,584%				
	1 jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan				paket	1	1	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	298.321.000,00	217.456.700,00	72,89%				
	1 jumlah paket barang cetak dan penggandaan yg disediakan				paket	1	1	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.400.000,00	117.392.332,00	75,54%				
	1 jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				laporan	12	12	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.379.720,00	523.962.257,000	98,42%				
	1 jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				laporan	12	12	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.864.800.000,00	5.838.020.000,00	99,54%				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.864.800.000,00	5.838.020.000,00	99,54%				
	1 jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yg disediakan				jenis	3	3	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.578.770.000,00	1.579.104.500,00	61,23%				
	1 jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan				unit	1	1	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.204.709.500,00	44.052.492.549,00	99,66%				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000.000	113.825.580,00	90,34%				
	1 jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				laporan	12	12	100,00%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.574.560.000,00	43.446.756.194,00	99,71%				
	1 Pembayaran jasa langganan				laporan	12	12	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.149.500,00	491.910.775,00	97,57%				
	1 jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yg disediakan				laporan	12	12	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.820.450,00	1.864.338.278,00	85,65%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.300.000,00	433.909.025,00	81,36%				
	1 jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.				unit	37	37	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.050.000,00	169.311.132,00	80,61%				
	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				bulan	12	12	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	473.470.450,00	467.529.234,00	98,75%				
	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi				bulan	12	12	100,00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.000.000,00	793.588.887,00	82,67%				
	1 Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				unit	1	1	100,00%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.822.422.074,00	3.024.749.405,00	79,13 %				
	1 Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu				%	100	100	100,00%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	2. Persentase ketetapan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah				%	100	100	100,00%
	3. Prosentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD				%	100	100	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.450.911.100,00	2.163.487.660,00	88,27				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	213.791.200,00	195.572.668,00	91,48				
	1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun				Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi, penyusunan perubahan kua dan perubahan PPAS	134.839.000,00	133.701.450,00	99,16				
	1 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun				Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi , penyusunan dan verifikasi RKA, SKPD	1.240.500.000	11.383.500,00	91,77				
	1 Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi				Dokumen	75	75	100%
	Koordinasi ,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12.405.000,00	6.783.025,00	54,68				
	1 Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi				Dokumen	75	75	100%
	Koordinasi ,Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	38.520.000,00	38.312.550,00	99,46				
	1 Jumlah DPA diverifikasi				Dokumen	75	75	100%
	Koordinasi ,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	16.410.000,00	11.846.500,00	72,19				
	1 Jumlah Perubahan DPA diverifikasi				Dokumen	75	75	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.322.649.200,00	1.143.194.522,00	86,43				
	1 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				Dokumen	2	2	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.473.200,00	66.308.050,00	69,45				
	1 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	604.418.500,00	556.385.395,00	9.205				
	1 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	697.097.724,00	633.543.119,00	90,88				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.291.000,00	79.349.790,00	90,90				
	1 Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Dokumen	12	12	100%
	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	147.149.150,00	113.877.221,00	77,39				
	1 Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan penerbitan ANGGARAN Kas dan SPD				Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.	85.638.900,00	80.718.478,00	94,25				
	1 Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.				Dokumen	12	12	100%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	266.884.674,00	259.846.758,00	97,36				
	1 Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan Transaksi non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank				Dokumen	12	12	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.130.000,00	40.980.707,00	88,84				
	1 Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.Laporan aliran kas, dan pelaksanaan PEMUNGUTAN/Pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga(PFK) dan Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran				Dokumen	12	12	100%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait.	64.004,000,00	58.770.165,00	9.182				
	1 Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait				Dokumen	1	1	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.072.722.250,00	639.919.858,00	59,65				
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12.711.000,00	11.255.265,00	88,55				
	1 Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				laporan	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	462.667.850,00	461.424.263,00	99,73				
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota				Dokumen	1	1	100%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	163.487.400,00	163.083.505,00	99,75				
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Dokumen	1	1	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	4.632.000,00	4.156.825,00	89,74				
	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				orang	50	50	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	491.221.944.074,00	-	-	-	-	-	-
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	491.221.944.074,00	-					
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	30.915.000,00	28.560.000,00	9.238				
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				Laporan	3	3	100%
	Analisis i Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	385.258.429.670,00	384.547.771.370,00	99,82				
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Laporan	1	1	100%
	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	25.063.948.455,00	14.515.235.090,00	57,91				
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Laporan	1	1	100%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	85.552.763.949,00	55.102.027.443,00	6.595				
	Jumlah Laporan Hasil Pengelola Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				Laporan	3	3	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.799.677.300,00	3.487.772.352,00	91,66				
	Prosentase OPD yang tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah <BMD> Kategori A				%	84	84	100%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.799.677.300,00	3.482.772.352,00	91,66				

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Penyusunan standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	744.206.000,00	561.575.968,00	72,54				
	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	308.970.000,00	286.925.850,00	9.287				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				Laporan	1	1	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.402.561.800,00	1.356.076.650,00	9.669				
	Jumlah Laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah				Laporan	1	1	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	628.665.000,00	621.628.492,00	98,88				
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				Laporan	1	1	100%
	Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	496.354.500,00	487.044.287,00	98,12				
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Dokumen	1	1	100%
	Pembinaan Pengelolaan BARANG Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	188.920.000,00	169.521.105,00	89,73				
	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				orang	48	48	100%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (UPT Stamag)	3.651.457.930,00	3.456.624.464,00	94,66				
	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				laporan	12	12	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.819.107.675,00	14.818.806.704,00	93,68				
	1. Persentase PAD terhadap total pendapatan				%	32	36,65	114,53
	2. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah				%	9,49	22,28	234,77
	3. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah				%	78,90	84,54	107,15%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
	Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	102.899.900,00	63.254.775,00	61,47				
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				Dokumen	2	2	100%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	182.237.400,00	84.661.850,00	46,46				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan I Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				Laporan	8	8	100%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	639.098.500,00	501.883.869,00	78,53				
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				Laporan	86	86	100%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	177.608.000,00	135.227.408,00	76,14				
	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya				Obyek pajak	2.000.000	1.911.400	95,57%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	365.265.000,00	352.796.014,00	96,59				
	Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak daerah				dokumen	667.000	654.315	101,44%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	794.956.800,00	677.399.360,00	85,21				
	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				Jenis/layanan	10.000	12.884	128,84%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	549.425.000,00	344.673.964,00	6.273				
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				Dokumen	3800	6344	166,95%
	Penagihan Pajak Daerah	10.546.581.000,00	10.316.068.271,00	97,81				
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak				Dokumen	12	12	100%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	85.535.800,00	81.991.105,00	9.586				
	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak Daerah				Dokumen	500	510	102%
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	2.268.801.375,00	2.155.676.633,00	95,01				
	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah				Dokumen	33	33	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	106.698.900,00	105.173.455,00	98,57				
	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				Laporan	12	12	100%

Lampiran 2

Data Inovasi Perangkat Daerah

**DATA INOVASI
BKAD S/D 2025**

NO	NAMA INOVASI PELAYANAN PUBLIK (PROGRAM/APLIKASI/DLL)	KETERANGAN /NARASI TERKAIT INOVASI /PEMANFAATANNYA DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK)
1	2	3
1	Aplikasi pengajuan KKPD	- Dalam rangka mempermudah OPD dalam memenuhi dokumen pengajuan KKPD - Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan
2	Sistem permohonan salinan SPPT PBB-P2 secara online dan dapat dicetak secara mandiri oleh wajib pajak	Dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak daerah dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak PBB Kabupaten Sleman untuk mengakses dokumen perpajakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman telah membuat sistem pelayanan permohonan salinan SPPT PBB P2 yang dapat diakses secara online dan dapat dicetak secara mandiri oleh wajib pajak (Dikembangkan di tahun 2025 dan diterapkan mulai awal tahun 2026)
3	Aplikasi SPSR (Sistem Pengelolaan Surat Rekening)	Sistem pengelolaan surat rekening adalah rangkaian proses dan aplikasi yang digunakan untuk menyusun, menerbitkan, mencatat, dan mengarsipkan rekening.
4	NPWPD Digital	Inovasi penerbitan NPWPD Digital diberlakukan agar Wajib Pajak dapat lebih mudah melakukan pelaporan pajak daerah tanpa harus menunggu nomor NPWPD berbentuk fisik diberikan oleh petugas. Sehingga proses pendaftaran dan pelaporan pajak daerah berjalan lebih efektif dan efisien.
5	Pembayaran Retribusi di Lingkungan UPTD Stadion Maguwoharjo Melalui Pembayaran Digital	Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tanpa harus bergantung pada metode konvensional yang terbatas. Dari sisi pemerintah daerah, inovasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi, mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas karena setiap transaksi tercatat secara real time dan dapat dipantau dengan lebih akurat.

Lampiran 3

Data Prestasi Perangkat Daerah

Data Prestasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Nama Prestasi	Prestator	Tingkat Prestasi (Kab/DIY/Nasional)	Data Dukung (Foto piagam/sertifikat dan penyerahan)
1	2	3	4	5
1	IPKD tahun 2024 penilaian tahun 2025	Pemda Sleman	Peringkat 1 tingkat DIY	Pergub no. 417 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil IPKD kabupaten/kota di DIY tahun 2025
2	Ketepatan Waktu Iuran PFK Pemerintah Daerah	Pemda Sleman	Peringkat 2 tingkat DIY	

Lampiran 4

Laporan Capaian Indikator Kinerja Kunci dan Dokumen Pendukung

Laporan Capaian Indikator Kinerja Kunci dan Dokumen Pendukung

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot: 5%) Keuangan (Bobot Urusan: 20%)

NO	IKK	RUMUS		ISIAN	CAPAIAN	SATUAN	BOBOT	OPD
4.B.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	x 100%	1.007.398.937.828,00	29%	Persen	25%	BKAD
		Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		3.421.314.068.737,00				
4.B.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	x 100%	1.484.607.544.203,74	44%	Persen	25%	BKAD
		Realisasi pendapatan daerah		3.343.399.562.281,58				

NO	IKK	RUMUS		ISIAN	CAPAIAN	SATUAN	BOBOT	OPD
4.B.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	x 100%	2.387.551.637.993,91	75%	Persen	25%	BKAD
		Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N		3.176.338.114.450,52				
4.B.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	x 100%	919.004.741.768,00	31,50%	Persen	25%	BKAD
		Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa		2.917.402.901.587,00				

2. Laporan EKPDK

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian			OPD
1	2025	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	1.786.054.786.278,30	X 100 % =	92,33%	BKAD
			Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	1.934.361.901.744,00			
2	2025	Persentase Penurunan SILPA	(Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun - N)	114.283.447.831,06	X 100 % =	42,69%	BKAD
			Nilai SILPA Tahun -N	267.702.495.759,08			
3	2025	Pertambahan Nilai Aset Tetap	(Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N)	456.934.219.534,75	X 100 % =	8,54%	BKAD
			Nilai Aset Tetap Tahun -N	5.352.316.592.327,81			



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Kategori Urusan:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan:

Keuangan

Uraian IKK:

Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya

Rumus:

$$\frac{\text{Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)}}{\text{Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
4.B.1	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	1,007,398,937,828.00	29%
	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,421,314,068,737.00	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Kategori Urusan:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan:

Keuangan

Uraian IKK:

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
4.B.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1,484,607,544,203.74	44%
	Realisasi Pendapatan Daerah	3,343,399,562,281.58	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Kategori Urusan:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan:

Keuangan

Uraian IKK:

Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N

Rumus:

$$\frac{\text{Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N}}{\text{Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
4.B.2	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	2,387,551,637,993.91	75%
	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	3,176,338,114,450.52	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Kategori Urusan:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan:

Keuangan

Uraian IKK:

Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan public

Rumus:

$$\frac{\text{Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik}}{\text{Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
4.B.4	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	919,004,741,768.00	31,50%
	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2,917,402,901,587.00	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Indikator:

Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
3	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	1,786,054,786,278.30	92,33%
	Realisasi		
	Pendidikan	905,681,059,034.46	
	Kesehatan	576,957,690,721.09	
	Pekerjaan umum & tata ruang	206,031,180,535.53	
	Perumahan dan pemukiman	19,022,804,443.00	
	Ketertiban umum	44,503,850,507.99	
	Sosial	33,858,201,036.23	
	Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	1,934,361,901,744.00	
	Anggaran:		
	Pendidikan	964,918,616,180.00	
	Kesehatan	617,356,580,188.00	
	Pekerjaan umum & tata ruang	246,967,255,805.00	
	Perumahan dan pemukiman	19,785,606,326.00	
	Ketertiban umum	49,425,284,747.00	
	Sosial	35,908,558,498.00	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Indikator:

Persentase Penurunan SILPA

Rumus:

$$\frac{(\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N})}{\text{Nilai SILPA Tahun -N}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
4	Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N	114,283,447,831.06	74,49%
	Nilai SILPA Tahun N	267,702,495,759.08	
	Nilai SILPA Tahun -N	153,419,047,928.02	
	Nilai SILPA Tahun -N	153,419,047,928.02	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Data Dukung Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

Indikator:

Pertambahan Nilai Aset Tetap

Rumus:

$$\frac{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurangi Nilai Aset Tetap Tahun -N})}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun -N}} \times 100\%$$

No	Uraian	Anggaran 2025	Capaian 2025
5	Nilai Aset Tetap Tahun N dikurangi Nilai Aset Tetap Tahun -N	456.934.219.534,75	8,54 %
	Nilai Aset Tetap Tahun N	5.809.250.811.862.56	
	Nilai Aset Tetap Tahun -N	5.352.316.592.327.81	
	Nilai Aset Tetap Tahun -N	5.352.316.592.327.81	

Sumber data: LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2025 (unaudited)

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah



ABU BAKAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710710 199101 1 002